

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGKAPAN IKAN
TERUKUR (PIT) DALAM MENINGKATKAN HASIL
TANGKAPAN IKAN NELAYAN DI DESA TAPIAN
NAULI I, KECAMATAN TAPIAN NAULI,
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,
PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

**OLEH :
AYU ANNISA FITRI SIMANUNGKALIT
(218520003)**



**STUDI ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2025

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/3/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)5/3/26

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGKAPAN IKAN
TERUKUR (PIT) DALAM MENINGKATKAN HASIL
TANGKAPAN IKAN NELAYAN DI DESA TAPIAN
NAULI I, KECAMATAN TAPIAN NAULI,
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,
PROVINSI SUMATERA UTARA.**

SKRIPSI

Di Ajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan

Area

Oleh :

Ayu Annisa Fitri Simanungkalit

(218520003)

**STUDI ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 5/3/26

Access From (repository.uma.ac.id)5/3/26

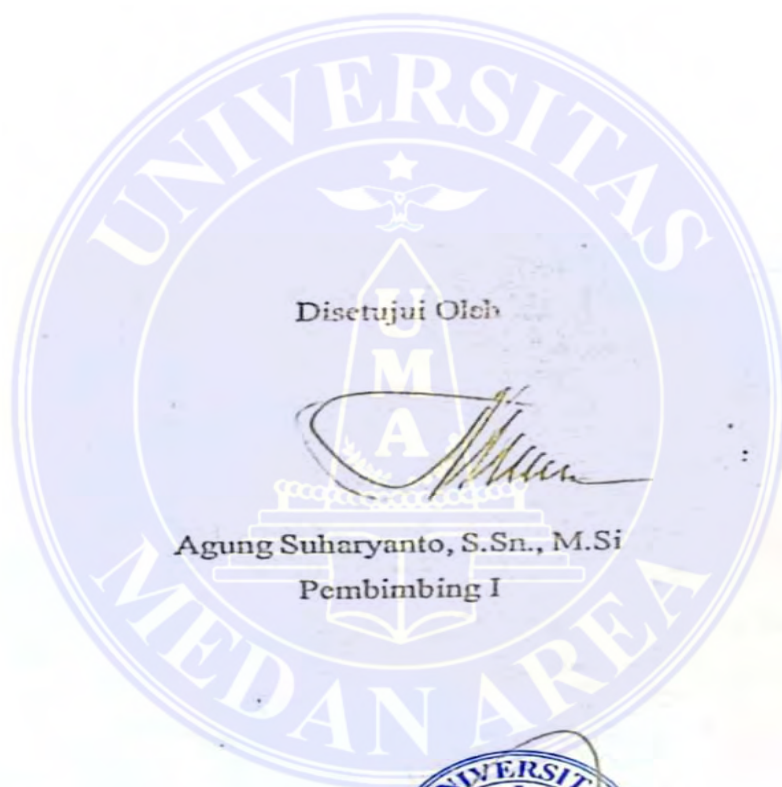
HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Implementasi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dalam meningkatkan hasil tangkapan ikan nelayan di desa Tapan Nauli I, Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara.

Nama : Ayu Annisa Fitri Simanungkalit

NPM : 218520003

Studi : Administrasi Publik



Tanggal Lulus : 02 September 2025

iii

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 01 April 2025



Ayu Annisa Fitri Simanungkalit

218520003

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR, SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan, dibawah ini :

Nama : Ayu Annisa Fitri Simanungkalit
NPM : 218520003
Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Jenis/Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Dengan pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas royalti Non-Eksklusif (Non-Ekslusive Royalty-Free Righth) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGKAPAN IKAN TERUKUR (PIT) DALAM MENINGKATKAN HASIL TANGKAPAN IKAN NELAYAN DI DESA TAPIAN NAULI I, KECAMATAN TAPIAN NAULI, KABUPATEN TAPANULI, SUMATERA UTARA"** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif di Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk tugas akhir skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya :

Medan, 1 April 2025



Ayu Annisa Fitri Simanungkalit

218520003

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) di Desa Tapan Nauli I, Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka teori implementasi Edward III yang mencakup variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur di Desa Tapan Nauli I dapat dikatakan efektif karena berhasil meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kepatuhan nelayan dalam mengelola sumber daya laut. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa dukungan komunikasi yang intensif, alokasi sumber daya yang tepat, komitmen aparatur desa, dan struktur birokrasi yang jelas merupakan kunci utama dalam mendorong keberlanjutan kebijakan penangkapan ikan terukur di tingkat lokal. Implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur di Desa Tapan Nauli I didukung oleh komunikasi efektif antara pemerintah desa, nelayan, dan stakeholder, ketersediaan anggaran serta bantuan alat tangkap, komitmen aparat desa, struktur birokrasi yang jelas, dan adanya pelatihan serta pendampingan bagi nelayan. Namun, pelaksanaan kebijakan masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan dana, peralatan, dan infrastruktur, rendahnya keseriusan aparat desa dan adaptasi nelayan, birokrasi yang berbelit, serta minimnya sosialisasi sehingga pemahaman dan partisipasi nelayan belum optimal.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penangkapan Ikan Terukur (PIT), Hasil Tangkapan Ikan, Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi, Pengelolaan Sumber Daya Laut.

ABSTRACT

This study aims to describe the implementation of the Measured Fishing Policy (PIT) in Tapan Nauli I Village, Tapan Nauli District, Central Tapanuli Regency, and to identify its supporting and inhibiting factors. The study used a qualitative approach with the Edward III implementation theory framework that includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure variables. The results of the study indicate that the implementation of the measured fishing policy in Tapan Nauli I Village can be said to be effective because it has succeeded in improving fishermen's understanding, skills, and compliance in managing marine resources. This success indicates that intensive communication support, appropriate resource allocation, commitment of village officials, and a clear bureaucratic structure are the main keys in encouraging the sustainability of the measured fishing policy at the local level. The implementation of the measured fishing policy in Tapan Nauli I Village is supported by effective communication between the village government, fishermen, and stakeholders, the availability of budget and fishing gear assistance, the commitment of village officials, a clear bureaucratic structure, and the provision of training and mentoring for fishermen. However, the implementation of the policy still faces obstacles in the form of limited funds, equipment, and infrastructure, low levels of seriousness from village officials and fishermen's adaptation, convoluted bureaucracy, and minimal socialization so that fishermen's understanding and participation are not optimal.

Keywords: Policy Implementation, Measured Fishing Intake (PIT), Fish Catch Results, Supporting and Inhibiting Factors of Implementation, Marine Resource Management.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Ayu Annisa Fitri Simanungkalit merupakan penulis pada skripsi ini. Lahir di kota Madya Sibolga, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 08 Desember 2002. Penulis merupakan anak ke-1 (satu) dari 2 (dua) bersaudara, dari pasangan Adi Putra Simanungkalit dan Arnida Simatupang, S.E.

Penulis pertama kali memasuki dunia Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) di TK Aisyah Pargodungan pada tahun 2008 dan tamat pada tahun 2009. Ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 156476 Lingkungan II, Poriaha Barung-Barung dan tamat pada tahun 2015. Setelah itu, Penulis melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 panorusan dan tamat pada tahun 2018. Kemudian setelah tamat dari SMP, penulis lanjut ke Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Parombunan, Sibolga dan tamat pada tahun 2021 dan terakhir di tahun yang sama, penulis melanjutkan dan telah terdaftar sebagai mahasiswi di Perguruan Tinggi Universitas Medan Area, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Administrasi Publik.

Adanya ketekunan tinggi dalam belajar serta berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini dengan cara tahap-bertahap. Semoga dengan penulisan ini tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi yang positif bagi pendidikan.

Akhir kata dari penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya telah selesainya skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) Dalam Meningkatkan Hasil Tangkapan Ikan Di Desa Tapian Nauli I, Kecamatan tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara”

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ***“Implementasi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) Dalam Meningkatkan Hasil Tangkapan Ikan Nelayan Di Desa Tapian Nauli I, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara”***. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Administrasi Publik di Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Besar harapan penulis semoga penulisan Skripsi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk para pembaca. Penulis juga sangat menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, karena pengetahuan dan pengalaman masih terbatas. Penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

Puji syukur dan terimakasih Kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, karunia, kesehatan dan umur yang panjang hingga penulis dapat sampai ke titik ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, terutama kepada cinta pertama dan pintu syurga, Ayahanda Adiputra Simanungkalit dan Ibunda Arnida Simatupang, S.E yang hingga detik ini terus berjuang untuk memberikan dukungan secara materi maupun dukungan secara moral, motivasi, dan doa tiada henti kepada putrinya selama proses penelitian dan penulisan skripsi ini. Ibunda Tercinta Ibu Arnida Simatupang, S.E juga telah

viii

melahirkan, merawat, membimbing penulis sampai sukses serta membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, cinta dan perjuangan yang luar biasa. Tanpa kasih sayang, perhatian, dan pengorbanan Ayahanda dan Ibunda, penulis tidak akan dapat berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terimakasih atas segala yang telah Ayahanda dan Ibunda berikan kepada Penulis, Penulis mempersembahkan skripsi ini sebagai tanda terimakasih dan cinta penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari banyak dukungan dan bantuan orang-orang sekitar penulis. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih banyak sebesar-besarnya kepada :

1. Ketua Yayasan Pendidikan haji Agus Salim beserta Jajarannya ;
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.eng. M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area ;
3. Bapak Dr.Walid Musthafa S., S.Sos., M.IP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area ;
4. Bapak Dr. Drs. Indra Muda MAP selaku Ketua Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area ;
5. Bapak Dr. Agung Suharyanto, S.Sn, M.Si., M.IKom selaku Dosen yang sudah banyak meluangkan waktunya membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan ketulusan serta memberikan arahan, masukan, serta motivasi yang sangat berharga selama proses penelitian ini berlangsung ;
6. Bapak Amas Mashudin, S.IP, M.AP selaku sekretaris dalam proses penelitian skripsi ini ;
7. Ibu Dr. Chairika Nasution, S.AP, M.AP, selaku dosen penguji dalam proses penulisan skripsi ini ;

8. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada saudara tercinta Ryan Ardiansyah Simanungkalit yang telah mendukung penulis, hingga sampai ke titik ini ;

9. Teman-teman seperjuangan Studi Ilmu Administrasi atas motivasi, dukungan dan pengalaman serta pembelajaran selama dibangku kuliah, serta teman-teman saya yang telah mendukung saya : Rahma Sari Tanjung, Liza Anggraini Panggabean, Marta Yohana siregar, Venica Agnes, Siti Khairiah, Ayu Maida Sari, serta teman-teman lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Saya ucapkan terimakasih ;

10. Seluruh Pegawai kantor kepala desa, dan staff jajarannya, khususnya Bapak Alitua Situmeang, ST., Bapak Inra Waruwu, dan Bapak Metjen Tanjung, yang bersedia menjadi narasumber penelitian saya. Tidak lupa juga para nelayan yang telah meluangkan waktu kepada penulis, yaitu Bapak Meijen Panggabean, Bapak Abdul Gani Hutagalung, Bapak Masludin Pasaribu, Bapak Binsar Siregar, Bapak Azhar hutagalung dan nelayan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Penulis ucapkan terimakasih.

Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan penuh rasa terima kasih guna perbaikan kelak di masa mendatang. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca serta pihak-pihak yang membutuhkan.

Medan, February 2025



Ayu Annisa Fitri Simanungkalit

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR, SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian.....	15
1.4 Manfaat Penelitian.....	15
1.4.1 Manfaat Teoritis	15
1.4.2 Manfaat Praktis.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
2.1 Kebijakan.....	18
2.1.1 Definisi Kebijakan.....	18
2.1.2 Kebijakan Publik	20
2.2 Model Implementasi Kebijakan George C Edward III.....	22
2.3 Penelitian Terdahulu	31
2.4 Kerangka Pemikiran	32
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Jenis Penelitian	37
3.2 Lokasi Peneliti	40
3.3 Waktu Penelitian	41
3.4 Informan Penelitian	41

3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.6 Teknik Analisis Data	48
3.7 Validasi Data	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	55
4.1. Deskripsi Umum Objek Penelitian.....	55
4.1.1. Gambaran Desa Tapian Nauli I.....	55
4.1.2. Gambaran Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan.....	61
4.1.3. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur	76
4.2 Hasil dan Pembahasan.....	79
4.2.1 Implementasi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Tapian Nauli I dalam Meningkatkan Hasil Tangkapan Ikan Nelayan di Desa Tapian Nauli I,	79
4.2.2 Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Dalam Mempengaruhi Hasil Tangkap	98
4.2.2.1 Faktor Pendukung.....	98
4.2.2.2 Faktor Penghambat	108
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	115
5.1 Kesimpulan.....	115
5.2 Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA.....	118
LAMPIRAN	126

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kerangka Berpikir.....	31
Gambar 2	Triangulasi Data.....	52
Gambar 3	Map Tapian Nauli	54
Gambar 4	Perangkat Desa	55
Gambar 5	Grafik Data Keluarga.....	57
Gambar 6	Nelayan Modern	73



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Penelitian Terdahulu	26
Tabel 2	Waktu Penelitian	36
Tabel 3	Informan Penelitian	42
Tabel 4	Data Pekerjaan Di Tapian Nauli	57
Tabel 5	Bantuan Pemerintahan Kepada masyarakat Nelayan	64
Tabel 6	Kelompok Nelayan	66
Tabel 7	Pedoman Wawancara	108



LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Riset (UMA)	105
Lampiran 2 Surat Izin Riset (Tempat Penelitian)	106
Lampiran 3 Bebas Pustakawan	107
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian.....	108
Lampiran 5 Lampiran Data Diri Informan	119
Lampiran 6 Tabel 7 : Pedoman Wawancara	121



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara maritim dengan potensi perikanan yang sangat besar. Namun, hasil tangkapan ikan yang diperoleh hingga saat ini masih belum optimal. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), produk perikanan Indonesia pada tahun 2020 mencapai sekitar 6,47 juta ton atau sekitar 35,08 % dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu sekitar 18,44 juta ton. Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) salah satu tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat (BPS, 2020).

Berbagai program telah dilaksanakan untuk mendukung masyarakat, terutama para nelayan. Di antaranya adalah pemberian bantuan alat tangkap ikan kepada nelayan seperti pemberian jaring tangkap dan tambatan perahu, pembangunan pondok nelayan di pesisir pantai, serta pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT). Selain itu, terdapat juga premi asuransi nelayan dan penyediaan pabrik es untuk menjaga kualitas hasil tangkapan yang didanai melalui dana desa. Dengan berbagai upaya ini, pemerintah bertekad untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, serta memperbaiki kualitas pelayanan publik.

Nelayan adalah pilar utama ekonomi masyarakat di berbagai wilayah, terutama di desa-desa pesisir. Salah satu contohnya adalah di Desa Tapian Nauli I. Desa ini menyimpan pesona yang tiada tara, berlokasi di tepian pantai

keterikatan yang kuat dengan lautan yang menjadi sumber kehidupan bagi Warga sekitar. Sektor perikanan merupakan penopang utama perekonomian desa ini. Setiap hari, para nelayan setempat berlayar menggunakan perahu-perahu tradisional maupun perahu modren, nelayan berusaha menangkap ikan demi memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Di perairan Tapian Nauli I, beragam species ikan dapat ditemukan, seperti ikan tongkol, ikan tuna, ikan kerapu, ikan teri, ikan buntal, ikan gembung, ikan bawal, dan masih banyak biota laut lain yang hidup di laut Tapian Nauli I.

Nama "Tapian Nauli" berasal dari bahasa Batak Toba, yang merupakan bahasa asli masyarakat setempat. "Tapian" berarti "tepi" atau "pinggir", sedangkan "Nauli" berarti "sungai" atau "air". Jadi, nama "Tapian Nauli" dapat diartikan sebagai "tepi sungai" atau "pinggir air". Sungai Nauli memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat setempat, sebagai sumber air, transportasi, dan sumber daya alam lainnya. Tapian Nauli saat ini sudah di pisah menjadi 4 bagian (desa) yang di mulai dari hulu sungai yaitu Desa Tapian Nauli IV, desa Tapian Nauli III dan berakhir di muara kelurahan Tapian Nauli II. Desa Tapian Nauli I berada disepanjang pinggiran pantai. Adapun studi kasus yang diangkat peneliti yaitu desa Tapian Nauli I yang berada di tepi teluk tapian nauli (pinggir pantai) dimana sumber ekonomi utama pendapatan masyarakat nya adalah nelayan.

Luas wilayah Desa Tapian Nauli I menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Tengah adalah sekitar 1,94 km², dengan jarak menuju ibu kota kecamatan sekitar $\pm$ 4 km. Secara geografis, daerah ini terletak pada koordinat 1,77 LU dan 98,74 BT. Desa Tapian Nauli I terdiri dari tujuh dusun, yaitu: Dusun 1 Pargodungan, Dusun 2 Panakkalan, Dusun 3 Labuan Angin, Dusun 4 Mursala,

Dusun 5 Sibura-bura, Dusun 6 Mujur Timber, dan Dusun 7 Hili Badalu. Dalam penelitian ini, penulis memilih Dusun 1 Pargodungan sebagai objek studi karena lokasi dusun ini yang berada di tepi teluk Tapian Nauli dan mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan.

Walaupun Desa Tapian Nauli I berada di tepi pantai, kehidupan para nelayan tidak selalu mudah. Mereka juga menghadapi berbagai tantangan yang beragam, antara lain:

- a. Perubahan iklim : Ditandai dengan perubahan cuaca dan musim yang tidak stabil memberikan dampak besar, seperti suhu air laut yang semakin meningkat, permukaan laut yang terus naik, dan pergeseran pola arus laut. Situasi ini berdampak pada jumlah ikan yang pada akhirnya menjadi ancaman bagi penghidupan para nelayan. Dengan kondisi cuaca yang terus berubah, nelayan harus lebih berhati-hati dan mahir dalam memahami isyarat dari alam demi keamanan serta untuk menjamin hasil tangkapan yang memadai.
- b. Keterbatasan alat tangkap : Salah satu kendala utama yang dihadapi nelayan dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas mereka. Keadaan ini berpotensi mengancam keberlanjutan mata pencaharian para nelayan.
- c. Sumber daya perikanan yang terbatas : Menciptakan persaingan yang tidak sehat di antara nelayan yang sering kali berujung pada konflik dan kerusakan ekosistem. Penurunan hasil tangkapan memaksa nelayan untuk melaut lebih jauh dan menghabiskan waktu lebih lama, yang pada gilirannya meningkatkan risiko dan biaya operasional.
- d. Persaingan di antara nelayan: Dalam mencari lokasi penangkapan ikan dapat memperburuk situasi, sering memicu konflik yang dapat menyebabkan

kerugian besar. Kerugian tersebut mencakup kerusakan alat tangkap, penurunan stok ikan, dan turunnya harga jual.

- e. Penggunaan alat tangkap yang di larang : Seperti pengeboman ikan dan pukut harimau (alat tangkap berbentuk kantong yang ditarik oleh satu atau dua kapal yang dapat merusak ekosistem laut). Alat ini mampu menjaring berbagai jenis ikan, baik kecil maupun besar, serta biota laut lainnya seperti penyu, kura-kura, lumba-lumba, hiu, dan labi-labi. Hal ini menyebabkan penurunan populasi ikan dan mengancam kelestarian sumber daya perikanan, bahkan berpotensi mengarah pada kepunahan.

Terlepas dari tantangan tersebut, semangat para nelayan tidak akan pernah padam. Mereka akan terus berjuang untuk menafkahi keluarga tercinta dan menjaga tradisi turun-menurun yang telah menjadi bagian dari kehidupan para nelayan. Salah satu tradisi unik adalah penangkapan ikan menggunakan “jaring tarik/pukat tradisional”. Jaring tarik ini dilakukan dengan kerja sama tim yang baik, beberapa nelayan akan menarik jaring bersama-sama, menciptakan pemandangan yang menarik dan penuh keakraban. Selain itu, terkenal dengan budidaya rumput laut dengan kualitas tinggi yang menjadi komoditas ekspor yang penting.

Kondisi yang dihadapi para nelayan mendorong perlunya perubahan praktik penangkapan ikan dan pengelolaan sumber daya laut untuk mencapai keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat nelayan. Tujuan perubahan ini adalah untuk meningkatkan hasil tangkapan, menjaga kelestarian ekosistem laut dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Mencapai tujuan perubahan bagi masyarakat nelayan membutuhkan komitmen dan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat termasuk nelayan, swasta, akademisi atau peneliti. Dengan

strategi yang tepat dan implementasi yang efektif, perubahan ini dapat membawa dampak positif bagi kesejahteraan nelayan dan kelestarian sumber daya laut.

Namun, dalam realitanya terdapat banyak faktor penghambat dan tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk mewujudkan perubahan yang berarti bagi masyarakat nelayan, diperlukan adanya transformasi. Perubahan ini mencakup berbagai aspek, antara lain:

- a) Aspek Ekonomi: Nelayan memiliki peranan yang sangat penting dalam menyediakan sumber protein hewani, menciptakan lapangan kerja. Namun, kehidupan ekonomi sering kali menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah rendahnya pendapatan, terbatasnya akses kepada modal dan teknologi, serta fluktuasi harga yang mempengaruhi hasil tangkapan.
- b) Aspek Sosial : Masyarakat nelayan memiliki ikatan sosial yang sangat kuat, tercermin dalam tradisi gotong royong dan saling membantu ketika melaut. Namun, kehidupan sosial juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti akses yang terbatas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, kemiskinan, serta perubahan sosial yang terjadi akibat modernisasi.
- c) Aspek Budaya: Budaya nelayan adalah warisan berharga yang telah diturunkan dari generasi ke generasi, kaya akan tradisi, dan keterampilan dalam menangkap ikan. Budaya ini mencerminkan hubungan yang harmonis antara manusia dan laut, serta menunjukkan rasa hormat yang mendalam terhadap alam. Sayangnya, keberadaan budaya nelayan kini terancam oleh modernisasi dan perubahan gaya hidup yang cepat.
- d) Aspek Politik: Nelayan seringkali berada dalam posisi yang rentan terhadap kebijakan politik. Akses terhadap sumber daya perikanan, regulasi

penangkapan ikan, dan kebijakan perlindungan sering dipengaruhi oleh berbagai faktor politik. Partisipasi nelayan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan sektor perikanan masih sangat terbatas, yang pada akhirnya menyebabkan ketidakadilan dan kerugian bagi para nelayan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap orang menginginkan hidup dalam lingkungan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, dan kebutuhan lainnya. Hal ini juga dirasakan oleh masyarakat nelayan yang berusaha untuk terbebas dari kemiskinan dan penderitaan. Kehidupan nelayan merupakan gabungan kompleks dari berbagai aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan serta menjaga kelestarian sumber daya laut, diperlukan upaya yang terintegrasi guna mengatasi tantangan di setiap aspek tersebut. Salah satu langkah penting adalah penerapan sistem pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, termasuk penentuan kuota tangkapan dan penutupan area penangkapan ilegal yang berfungsi untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan.

Menurut Sastrawidjaya (2002), komunitas nelayan adalah sekumpulan orang yang tinggal di desa-desa pantai atau pesisir yang menggantungkan mata pencahariannya dari hasil laut. Dalam konteks hukum, nelayan didefinisikan sebagai individu atau kelompok yang mencari nafkah dengan menangkap ikan di laut. Mereka bisa terdiri dari warga negara Indonesia maupun korporasi; yaitu badan usaha yang secara resmi terdaftar dan mematuhi peraturan yang ada, dengan identitas yang terpisah dari individu-individu di dalamnya, serta beroperasi dalam skala besar. Korporasi juga bisa dipahami sebagai kumpulan orang dan/atau

kekayaan yang terorganisir untuk meraih pendapatan dalam jumlah besar, bahkan mencapai miliaran atau triliunan rupiah. Selain itu, nelayan juga merupakan masyarakat yang tinggal di pesisir pantai dan memanfaatkan sumber daya laut seperti ikan, udang, rumput laut, kerang, dan terumbu karang. Dalam hal ini, nelayan buruh adalah mereka yang menyediakan tenaga kerja untuk proses penangkapan ikan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 7 tahun 2006, nelayan didefinisikan sebagai setiap orang yang mata pencahariannya berasal dari penangkapan ikan (Pemerintah RI, 2006). Selanjutnya, Pasal 1 angka 26 UU No. 7/2016 menyebutkan bahwa nelayan bisa berupa individu atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak (Pemerintah RI, 2016). Ada juga perbedaan antara nelayan tradisional dan nelayan modern. Nelayan tradisional adalah mereka yang menangkap ikan dengan peralatan sederhana, modal terbatas, dan organisasi tangkapan kecil, serta memanfaatkan hak perikanan secara turun-temurun berdasarkan budaya dan kearifan lokal. Sementara itu, nelayan modern menggunakan teknologi penangkapan yang lebih maju dibandingkan nelayan tradisional.

Berikut adalah beberapa perbedaan antara penangkapan ikan oleh nelayan tradisional dan nelayan modern:

1) Nelayan Tradisional

- a. Perahu Dayung, atau yang sering disebut Perahu Layar merupakan jenis perahu yang digerakkan baik oleh tenaga manusia maupun oleh angin. Dengan demikian, jangkauan dan kecepatan yang dapat dicapai oleh para nelayan menjadi terbatas.

- b. Alat pencaharian ikan yang sederhana, nelayan memanfaatkan keahlian dan pengalaman mereka dalam menentukan lokasi ikan dengan cara yang sederhana. Mereka mengamati tanda-tanda alam, seperti keberadaan burung camar maupun arus laut, untuk memudahkan pencarian ikan.
- c. Jaring Pancing, Jaring *Gillnet* (jaring insang), dan Jaring *Purse Seine* adalah jenis jaring yang dipasang atau ditarik secara manual. Dengan metode ini, kapasitas tangkapan yang diperoleh cenderung lebih kecil dibandingkan dengan penggunaan jaring *trawl*.
- d. Keramba Jaring Apung (KJA) : Keramba jaring apung adalah sistem budidaya perikanan yang menggunakan jaring atau keramba yang terapung di permukaan air, seperti di laut, danau, atau waduk. Keramba ini dirancang untuk memelihara ikan atau organisme laut lainnya dalam lingkungan yang terkendali.
- e. Lukka/Bubu : alat perikanan tradisional yang terbuat dari anyaman bambu atau rotan. Alat ini digunakan untuk menangkap ikan dan udang di perairan dangkal seperti sungai, danau, atau laut. Bubu bekerja dengan cara menarik ikan atau udang masuk melalui celah kecil, membuat mereka terjebak. Nelayan tradisional sering menggunakan bubu karena mudah dibuat dan digunakan, serta efektif dalam menangkap ikan dan udang. Bubu juga bisa dilengkapi dengan umpan untuk menarik ikan atau udang. Alat ini sangat berguna bagi nelayan tradisional untuk meningkatkan hasil tangkapan mereka.
- f. Tombak : alat tradisional yang digunakan untuk menangkap ikan dengan cara menusuknya. Biasanya, tombak terbuat dari kayu atau bambu dengan

ujung yang tajam. Nelayan menggunakan tombak di perairan dangkal atau jernih dengan teknik langsung. Penggunaan alat ini memerlukan keterampilan dan ketelitian. Tombak digunakan di berbagai daerah karena metode ini mudah dan efisien untuk menangkap ikan.

2) Nelayan Modern

- a) Perahu Motor: Sebuah perahu yang dilengkapi dengan mesin bertenaga besar, memberikan kemampuan kepada nelayan untuk melaut lebih jauh dan dengan kecepatan yang lebih tinggi
- b) Alat Pencari Ikan (*Fish Finder*): Merupakan perangkat yang memanfaatkan teknologi sonar untuk mendeteksi keberadaan ikan di bawah permukaan laut, sehingga para nelayan dapat dengan lebih tepat menemukan lokasi ikan.
- c) Jaring Trawl adalah jaring berbentuk kerucut yang ditarik oleh kapal untuk menangkap ikan dalam jumlah besar.
- d) GPS dan kompas digital adalah peralatan navigasi yang memudahkan nelayan dalam menentukan posisi dan arah perjalanan mereka di laut dengan tingkat presisi yang lebih tinggi.
- e) Sistem Pendingin atau Sistem Air Laut yang Didinginkan *Refrigerated Sea Water* (RSW) adalah peralatan yang berfungsi untuk menjaga kesegaran ikan selama perjalanan pulang melaut, sehingga kualitas ikan tetap terjaga.
- f) Sistem komunikasi yang canggih, seperti radio komunikasi dan telepon satelit, memungkinkan para nelayan untuk berinteraksi dengan daratan serta berkomunikasi satu sama lain di tengah laut.
- g) Efisiensi dan Produktivitas yang Tinggi: Dengan memanfaatkan teknologi canggih, para nelayan modern dapat menangkap ikan dalam jumlah yang lebih banyak dan dengan waktu yang lebih efisien.

Perbedaan teknologi antara nelayan tradisional dan nelayan modern memberikan dampak yang signifikan terhadap hasil penangkapan ikan, efisiensi, dan keberlanjutan. Meskipun nelayan modern mampu menangkap ikan dalam jumlah yang lebih besar, teknik penangkapan yang digunakan dapat menimbulkan efek negatif pada ekosistem laut jika tidak diterapkan dengan bijak. Dengan kemajuan teknologi penangkapan ikan, nelayan modern kini memiliki akses kepada alat-alat yang lebih canggih, yang meningkatkan efisiensi dan produktivitas mereka. Namun, sangat penting untuk diingat bahwa pemanfaatan teknologi ini harus sejalan dengan upaya pelestarian sumber daya ikan demi keberlangsungan generasi mendatang.

Peneliti mengangkat teknik penangkapan ikan terukur secara tradisional karena para nelayan masih menggunakan teknik turun temurun dari nenek moyang. Dengan menggunakan teknik penangkapan ikan secara tradisional dapat lebih menjaga ekosistem laut yang ada di daerah tersebut. Namun ada beberapa nelayan yang telah menggunakan teknik penangkapan ikan secara modern karena perbedaan hasil tangkapan dan pendapatannya jauh lebih besar dibandingkan dengan yang tradisional. Namun terdapat dampak negatif karena menggunakan teknik penangkapan ikan modern nelayan secara tidak langsung merusak habitat ekosistem laut, apalagi jika nelayan menggunakan dengan kelompok besar. Oleh karena itu pemerintah desa setempat melarang (secara sosialisasi/pendekatan) kepada para nelayan agar tidak menggunakan teknik penangkapan ikan secara modern. Selain merusak ekosistem laut juga mengganggu penangkapan nelayan secara tradisional serta mengurangi penghasilan nelayan tradisional.

Desa Tapian Nauli memiliki potensi sumber daya perikanan yang cukup besar, yang seharusnya dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan para nelayan. Namun, realitanya di lapangan menunjukkan bahwa banyak nelayan masih kesulitan untuk meningkatkan hasil tangkapan mereka yang masih tetap di bawah standard. Sosialisasi yang diterapkan oleh Kepala Desa Tapian Nauli I belum berhasil secara efektif dalam mendorong peningkatan hasil tangkapan, sehingga pendapatan para nelayan cenderung stagnan (buruk/tidak bergerak). Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap situasi ini antara lain Kurangnya populasi ikan, Rusaknya Terumbu Karang, Limbah industri, limbah masyarakat, Pengeboman Ikan/penangkapan ikan secara besar-besaran, Pembangunan rumah-rumah di bibir pantai, Terjadi fluktuasi harga, dan Perubahan iklim. Oleh sebab itu, sangat penting untuk melakukan penelitian yang mendalam guna menganalisis implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur dalam upaya meningkatkan hasil tangkapan ikan nelayan.

Nelayan sering menghadapi tantangan besar terkait penangkapan ikan, salah satunya adalah penurunan jumlah produksi perikanan tangkap. Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah, produksi perikanan tangkap ikan di Tapian Nauli I pada tahun 2019 mencapai 1,1 ton, mengalami penurunan dari 1.4 ton pada tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain berkurangnya populasi ikan, perubahan iklim, dan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Penelitian dari Universitas Sumatera Utara (USU) juga mengungkapkan bahwa alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dapat merusak ekosistem dan memperparah penurunan jumlah produksi perikanan tangkap di daerah tersebut. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan

kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan di Tapan Nauli I dalam meningkatkan hasil tangkapan ikan nelayan.

Pengelolaan sumber daya laut yang efektif sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan laut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Salah satu langkah strategis yang dapat diambil adalah menerapkan praktik penangkapan ikan yang terukur. Penangkapan ikan terukur adalah metode yang menggunakan alat tangkap tertentu yang telah ditetapkan dan diawasi dengan tujuan memastikan kegiatan penangkapan ikan berlangsung secara berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Menurut Sutrisno (2018), pendekatan ini merupakan cara yang efektif mengelola sumber daya perikanan serta meningkatkan pendapatan para nelayan (Sutrisno, 2018: 12).

Implementasi kebijakan penangkapan ikan yang terukur dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan, seperti alat tangkap yang selektif dan tidak merusak habitat laut. Penting juga untuk memastikan adanya pengawasan serta penegakan hukum yang efektif guna mencegah praktik penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan (Fauzi, 2019: 25). Penerapan praktik penangkapan ikan yang terukur dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan nelayan serta kesejahteraan masyarakat pesisir. Selain itu, hal ini juga dapat membantu menjaga kelestarian lingkungan laut dan meningkatkan keanekaragaman hayati di lautan (Fauzi, 2019: 30). Partisipasi masyarakat juga perlu dilakukan dalam pengelolaan sumber daya laut dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan laut (BPS, 2023).

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur pasal 1 ayat 1 menyebutkan Penangkapan Ikan Terukur adalah proses penangkapan ikan yang dilakukan secara terkendali dan proporsional. Kegiatan ini berlangsung di zona penangkapan yang telah ditentukan, dengan mengacu pada kuota yang telah ditetapkan. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan sekitarnya, serta memastikan pertumbuhan ekonomi nasional yang merata. Dalam Peraturan Menteri Kelautan telah dijelaskan secara jelas mengenai apa itu PIT, dasar hukum, kuota, zona dan informasi lainnya. Pengukuran ikan terukur di Tapian Nauli I Pargodungan menghadapi beberapa tantangan serius yang berdampak pada keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan nelayan lokal.

Beberapa masalah yang dihadapi adalah:

1. Kurangnya infrastruktur pengukuran yang memadai,
2. Keterbatasan sumber daya manusia.
3. Penggunaan alat tangkap yang tidak standar.
4. Kurangnya pengawasan dan pengendalian.
5. Dampak perubahan iklim

Masalah pengukuran ikan terukur di Tapian Nauli I Pargodungan memiliki dampak yang serius pada keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan nelayan lokal. Beberapa dampak yang dapat terjadi adalah :

1. Penurunan populasi ikan.
2. Overfishing.
3. Kerusakan ekosistem laut.

4. Penurunan pendapatan nelayan.
5. Keterancaman kesejahteraan nelayan lokal.

Untuk mengatasi masalah pengukuran ikan terukur di Tapian Nauli I Pargodungan, perlu dilakukan beberapa solusi, seperti:

1. Pembangunan infrastruktur pengukuran yang memadai.
2. Pelatihan nelayan lokal tentang pengukuran ikan terukur
3. Penggunaan alat pengukuran yang standar
4. Pengawasan dan pengendalian pengukuran ikan terukur yang efektif
5. Penelitian tentang dampak perubahan iklim pada pola migrasi ikan.

Dengan demikian, diharapkan masalah Penangkapan Ikan Terukur di Desa Tapian Nauli I Pargodungan dapat diatasi secara efektif, sehingga keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan nelayan lokal dapat terjamin dengan baik. Namun fakta dilapangan masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Implementasi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dalam Meningkatkan Hasil Tangkapan Ikan Nelayan di Desa Tapian Nauli I, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.”***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang masalah yang telah disampaikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi kebijakan penangkapan Ikan Terukur Tapian Nauli I dalam meningkatkan hasil tangkapan ikan nelayan di Desa Tapian Nauli I, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara?

- b. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan penangkapan Ikan Terukur Tapan Nauli I dalam meningkatkan hasil tangkapan ikan nelayan di Desa Tapan Nauli I, Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan Implementasi kebijakan penangkapan Ikan Terukur Tapan Nauli I dalam meningkatkan hasil tangkapan ikan nelayan di Desa Tapan Nauli I, Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara.
- b. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan penangkapan Ikan Terukur Tapan Nauli I dalam meningkatkan hasil tangkapan ikan nelayan di Desa Tapan Nauli I, Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori dalam bidang Penangkapan Ikan terukur (PIT), terutama dalam konteks pengelolaan hasil tangkapan ikan para nelayan. Dengan melakukan analisis mendalam mengenai penangkapan ikan terukur, peneliti mengeksplorasi cara pemerintah desa dalam mengimplementasikan kebijakan secara efektif untuk mencapai ketentuan, seperti peningkatan hasil tangkapan

nelayan, mengurangi overfishing, meningkatkan pendapatan nelayan, mengoptimalkan sumber daya serta meningkatkan kualitas ikan. Fokus dari penelitian ini terletak pada penangkapan ikan terukur (PIT) sebagai kunci dalam implementasi kebijakan serta usaha untuk meningkatkan sumber daya perikanan dan menjaga ekosistem laut.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta mengembangkan pola pikir yang ilmiah dan rasional dalam menghadapi berbagai permasalahan yang muncul.

2. Bagi Civitas Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori kebijakan publik. Selain itu, diharapkan juga dapat menjadi pertimbangan, masukan, atau referensi di kalangan akademis dalam kajian mengenai kebijakan peraturan daerah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang relevan/sejenis.

3. Bagi Masyarakat Nelayan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat nelayan mengenai pentingnya penangkapan ikan terukur dengan baik dalam meningkatkan hasil tangkapan ikan. Penelitian ini juga bertujuan untuk membantu nelayan mengatasi berbagai tantangan yang mereka hadapi melalui pengambilan keputusan yang tepat terkait kebijakan perikanan. Dengan demikian, diharapkan masyarakat mampu memahami dampak kebijakan tersebut terhadap kehidupan

mereka, sehingga semakin aktif dalam menyampaikan aspirasi dan kebutuhan kepada pemimpin desa.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan

2.1.1 Definisi Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2016), kebijakan dapat diartikan sebagai suatu konsep atau pedoman yang menjadi dasar dalam pelaksanaan tindakan, baik itu dalam konteks pekerjaan maupun kepemimpinan. Kebijakan ini dapat diterapkan pada berbagai entitas, seperti badan pemerintah, sektor swasta, maupun individu dan kelompok organisasi. Anderson (1979: 273-280) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah arah tindakan yang diambil oleh satu atau lebih aktor, baik individu maupun kelompok, untuk mengatasi permasalahan yang ada. Sementara itu, Carl J. Friedrich menyatakan bahwa kebijakan merupakan suatu proses pengambilan keputusan yang melibatkan para pemimpin dalam mencapai tujuan tertentu. Dunn (1994: 71) menambahkan bahwa kebijakan adalah tindakan yang dilakukan atau diabaikan oleh individu maupun kelompok, yang disertai dengan informasi valid dan dapat dipercaya tentang hasil dari kinerja kebijakan tersebut.

Kebijakan dapat disampaikan melalui ucapan maupun tulisan, bertujuan untuk memberikan petunjuk kepada pihak yang umumnya disebut sebagai pemimpin. Pemimpin memiliki tanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat, menciptakan inovasi, dan berfungsi sebagai komunikator yang menyampaikan ide-ide kepada masyarakat, guna meningkatkan kreativitas serta inisiatif masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya di sekitarmereka untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Iskandar (2012: 11)

bahwa kebijakan terdiri dari sekumpulan rencana , keputusan, aksi, perilak

tindakan atau ketidaklaksanaan yang diambil oleh aktor-aktor sebagai langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Selain itu, Thoha (2012: 23) mengemukakan bahwa kebijakan memiliki dua aspek, yaitu:

- 1) Kebijakan merupakan bagian dari praktik sosial yang tidak bersifat terpencil atau satu kali saja. Kebijakan dibuat oleh pemerintah sebagai respons terhadap berbagai peristiwa yang dialami oleh masyarakat, yang terus berkembang dalam konteks kehidupan sosial, meskipun terkadang situasi tersebut terasa terasing atau tidak familiar bagi mereka.
- 2) Kebijakan dapat dianggap sebagai respon terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi, dengan tujuan menciptakan keharmonisan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Selain itu, kebijakan juga berfungsi untuk memberikan insentif kepada mereka yang kurang rasional dalam upaya menciptakan kerja sama.

Di Indonesia, pemimpin tertinggi di tingkat pemerintahan desa adalah Kepala Desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 6, disebutkan bahwa "Kepala Desa memiliki tugas untuk menjalankan pemerintahan daerah, melaksanakan pembangunan desa, membina masyarakat, serta memberdayakan masyarakat sesuai dengan kewenangan yang berlaku" (Pemerintah RI, 2014). Tugas dan kewenangan pemerintah daerah meliputi beberapa aspek berikut:

- a) Pemerintah desa bertugas memimpin kebijakan yang telah ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- b) Mereka mengusulkan rancangan peraturan daerah dan menetapkan setelah mendapatkan persetujuan dari BPD.
- c) Salah satu fokus utama mereka adalah menyejahterakan kehidupan dan perekonomian masyarakat desa.

- d) Selain itu, mereka juga mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- e) Pemerintah desa berfungsi sebagai wakil desa, baik di dalam maupun di luar pengadilan, serta melaksanakan wewenang dan mendapatkan kuasa hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Carl J. Federick dalam Agustino (2008: 7), kebijakan dapat dipahami sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam konteks tertentu, di mana terdapat tantangan atau peluang untuk melaksanakan usulan tersebut. Kebijakan ini berfokus pada aktivitas yang bertujuan untuk mencapai sasaran tertentu (Taufiqurokhman & Satispi, 2018: 18). Dalam hal ini, kebijakan tidak hanya melibatkan tindakan untuk mengejar tujuan penting, tetapi juga harus secara jelas menunjukkan langkah-langkah konkret yang diambil untuk menangani permasalahan, bukan sekadar rekomendasi dari berbagai kegiatan yang diusulkan.

2.1.2 Kebijakan Publik

Menurut Taufiqurokhman (2015), Easton mendefinisikan kebijakan publik sebagai (*the authoritative allocation of values for the society*) pengalokasian nilai-nilai secara berwenang kepada seluruh masyarakat. Selain itu, Laswell dan Kaplan menggambarkan kebijakan publik sebagai suatu yang dirancang untuk mencapai tujuan, nilai, dan praktik tertentu, pencapaian tujuan dan nilai dalam praktik yang terarah. Sementara itu, Pressman dan Wildavsky menjelaskan kebijakan publik adalah sebuah hipotesis yang mencakup kondisi awal dan konsekuensi yang dapat diprediksi, sebagaimana dikutip oleh Winarno (2002: 17).

Studi kebijakan publik meliputi beragam bidang dan aspek, mencakup elemen-elemen penting seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan lainnya. Berdasarkan strukturnya, kebijakan publik dapat dikelompokkan sebagai kebijakan nasional, regional, atau lokal, yang terwujud dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, serta peraturan dari pemerintah daerah, gubernur, dan keputusan bupati atau walikota. Dari segi terminologi, terdapat banyak definisi tentang kebijakan publik (*public policy*), yang bervariasi tergantung sudut pandang yang digunakan.

Menurut Nugroho, terdapat dua karakteristik utama dari kebijakan publik, yaitu:

1. Kebijakan publik adalah konsep yang mudah dipahami, karena pada dasarnya merujuk pada berbagai tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan nasional.
2. Kebijakan publik juga dapat diukur dengan jelas, karena ukurannya terletak pada sejauh mana kemajuan yang dicapai dalam mewujudkan cita-cita yang telah ditetapkan.

Kebijakan publik didefinisikan sebagai serangkaian keputusan dan tindakan yang dirancang serta dilaksanakan oleh pemerintah atau aktor lain dalam masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu dan menyelesaikan masalah yang ada.

Menurut James E. Anderson, kebijakan publik adalah "*a purposive course of action followed by an actor or set of actor in dealing with a problem or matter of concern,*"

yang berarti kebijakan publik merupakan jalur tindakan yang disengaja diikuti oleh seorang pelaku/sekelompok pelaku dalam menghadapi suatu masalah atau isu yang menjadi perhatian. kebijakan publik melibatkan proses pengambilan keputusan yang sistematis dan terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan publik dapat berupa peraturan, , atau kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah/organisasi lain untuk memecahkan masalah masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, dan mencapai tujuan pembangunan.

2.2 Model Implementasi Kebijakan George C Edward III

Menurut Edward III dalam Mulyadi (2016: 68) mengemukakan bahwa pengaruh kebijakan ada 4, yaitu :

- a) Komunikasi : Komunikasi: Proses penyampaian informasi yang efektif dan jelas tentang kebijakan kepada pelaksana kebijakan sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan diimplementasikan dengan benar. Menurut Edwards III, komunikasi yang efektif dapat membantu mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan kesadaran tentang kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan.
- b) Sumber Daya: Ketersediaan sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia, keuangan, maupun teknologi, sangat penting untuk mendukung implementasi kebijakan. Edwards III menekankan bahwa kurangnya sumber daya dapat menghambat implementasi kebijakan dan mengurangi efektivitasnya.
- c) Disposisi: Sikap dan komitmen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Edwards III, disposisi yang positif dan komitmen yang kuat dari pelaksana kebijakan dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.
- d) Struktur Birokrasi: Struktur birokrasi yang efektif dan efisien sangat penting untuk mendukung implementasi kebijakan. Edwards III menekankan bahwa struktur birokrasi yang baik dapat membantu meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara pelaksana kebijakan.

Peneliti memilih untuk menggunakan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III, karena teori ini sangat relevan dalam menganalisis pelaksanaan kebijakan penangkapan ikan terukur di Desa Tapan

Nauli I. Dalam penelitiannya, Edward III menekankan pentingnya empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi. Dengan memanfaatkan teori Edwards III, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan penangkapan ikan terukur di Desa Tapan Nauli I serta mengevaluasi pengaruh berbagai faktor terhadap keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

Selain itu, teori Edward III juga akan membantu dalam mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi selama proses implementasi dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan yang diperlukan. Dengan memanfaatkan model ini, penelitian ini berupaya menganalisis pelaksanaan kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) di Desa Tapan Nauli I, serta mengkaji pengaruh berbagai faktor terhadap keberhasilan implementasi kebijakan dalam meningkatkan hasil tangkap ikan para nelayan. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kebijakan penangkapan ikan terukur yang lebih efektif dan efisien di Desa Tapan Nauli I serta meningkatkan kesadaran nelayan.

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun, Sumber	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Dan Persamaan
1.	Putri. N. Eka (2021) Jurnal Administrasi Publik.	Implementasi Kebijakan Penangkapan Ikan Berkelanjutan Di Wilayah Pesisir.	Penelitian Menunjukkan Bahwa Pendekatan Partisipatif Antara Pemerintah Desa Dan Masyarakat Pesisir Dalam Mengimplementasikan Kebijakan Penangkapan Ikan Berkelanjutan Meningkatkan Hasil Tangkapan Ikan Dan Kesadaran Lingkungan Nelayan.	Perbedaan : Peran Partisipasi Masyarakat Pesisir Dalam Mendukung Kebijakan Penangkapan Ikan Berkelanjutan, Sedangkan Peneliti Berfokus Pada Implementasi Kebijakan Dalam Meningkatkan Hasil Melalui Penangkapan Ikan Terukur (PIT). Persamaan : Membahas Pengelolaan Penangkapan Ikan Secara Berkelanjutan, Meningkatkan Hasil

No.	Nama, Tahun, Sumber	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Dan Persamaan
				Tangkapan Ikan Dan Menjaga Ekosistem Laut, Serta Menggunakan Pendekatan Kualitatif Dan Melibatkan Aktor Lokal Dalam Proses Implementasi Kebijakan.
2.	Hartono (2019) Jurnal Teknologi Informasi	Pengembangan Sistem Informasi Penangkapan Ikan Di Indonesia.	Pengembangan Sistem Informasi Penangkapan Ikan Dapat Meningkatkan Hasil Tangkapan Ikan Dan Mengurangi Dampak Negatif Terhadap Lingkungan.	Perbedaan : Berfokus Pada Penggunaan Teknologi Penangkapan Ikan. Sedangkan Peneliti Berfokus Pada Implementasi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) Persamaan : Keduanya Memiliki Tujuan Untuk Meningkatkan Hasil Tangkap Ikan.
3.	Sutrisno (2018) Jurnal Kebijakan Perikanan	Kerjasama Antara Pemerintah Dan Pihak Swasta Dalam Mengembangkan Infrastruktur Perikanan.	Kerjasama Antara Pemerintah Dan Pihak Swasta Dapat Meningkatkan Infrastruktur Perikanan Dan Hasil Tangkap Ikan.	Perbedaan: Berfokus Pada Kerjasama Antara Pemerintah Dan Pihak Swasta, Sedangkan Peneliti Berfokus Pada Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) Persamaan: Keduanya Memiliki Tujuan Meningkatkan Hasil Tangkap Ikan.
4.	Widyastuti (2019) Jurnal Ilmu Lingkungan	Penggunaan Alat Tangkap Yang Selektif Untuk Mengurangi Dampak Negative Terhadap Lingkungan.	Penggunaan Alat Tangkap Yang Selektif Dapat Mengurangi Dampak Negative Terhadap Lingkungan Dan Meningkatkan Hasil Tangkap Ikan.	Perbedaan: Berfokus Pada Penggunaan Alat Tangkap Yang Selektif, Sedangkan Peneliti Berfokus Pada Implementasi Penangkapan Ikan Terukur. Persamaan: Keduanya Memiliki Tujuan Meningkatkan Hasil Tangkap Ikan.
5.	Effendi (2017) Jurnal Ilmu Kelautan	Pengaruh Kualitas Alat Tangkap Terhadap Hasil Tangkap Ikan	Kualitas Alat Tangkap Yang Baik Dapat Meningkatkan Hasil Tangkap Ikan.	Perbedaan: Berfokus Pada Kualitas Alat Tangkap, Sedangkan Peneliti Berfokus Pada Implementasi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT). Persamaan: Keduanya Memiliki Tujuan Meningkatkan Hasil Tangkap Ikan.

No.	Nama, Tahun, Sumber	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Dan Persamaan
6.	Prayitno (2018) Jurnal Teknologi Perikanan	Penggunaan Teknologi Penangkapan Ikan Untuk Meningkatkan Hasil Tangkap Ikan.	Penggunaan Teknologi Penangkapan Ikan Dapat Meningkatkan Hasil Tangkap Ikan Dan Mengurangi Dampak Negatif Terhadap Lingkungan,	Perbedaan: Berfokus Pada Teknologi Penangkapan Ikan, Sedangkan Peneliti Berfokus Pada Implementasi Penangkapan Ikan Terukur (PIT). Persamaan: Keduanya Memiliki Tujuan Meningkatkan Hasil Tangkap Ikan.

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir adalah struktur konseptual yang berfungsi untuk mengorganisir dan menghubungkan berbagai ide atau konsep dalam suatu sistem atau proses berpikir. Dengan demikian, kerangka berpikir memiliki beragam fungsi, komponen, dan manfaat yang dapat meningkatkan kualitas penelitian serta membantu memahami fenomena atau masalah yang kompleks. Menurut Sugiyono (2017: 294) dalam bukunya “Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D” kerangka berpikir didefinisikan sebagai model konseptual yang menjelaskan hubungan antara teori dan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting.

Teori implementasi kebijakan publik George C. Edwards III (1980) dalam Nugroho (2009: 363) maka penelitian ini menganalisis bagaimana kebijakan Kepala Desa Tapan Nauli I dalam meningkatkan hasil tangkapan ikan diterapkan di lapangan. Menurut Edwards III, keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu :

1. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi, gagasan, atau pesan dari satu pihak ke pihak lain melalui berbagai cara, seperti lisan, tulisan, atau isyarat.

Dalam kebijakan publik, komunikasi yang efektif sangatlah krusial untuk mencapai keberhasilan, karena memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang seragam tentang tujuan dan sasaran kebijakan tersebut. Komunikasi dalam konteks ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran, seperti media massa, pertemuan publik, dan laporan resmi. Selain itu, untuk mencapai komunikasi yang efektif, penting untuk menyampaikan informasi dengan cara yang jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak. Keberhasilan komunikasi dalam kebijakan publik dapat diukur dari sejumlah indikator, antara lain:

- a) Tingkat kesadaran masyarakat tentang kebijakan
- b) Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan
- c) Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada sejauh mana kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada semua pihak yang terlibat. Beberapa hal yang bisa dianalisis dalam penelitian ini:

- a) Apakah nelayan mendapatkan informasi yang jelas tentang kebijakan yang diterapkan?
- b) Bagaimana cara kepala desa mensosialisasikan kebijakan (melalui pertemuan desa, penyuluhan, atau forum nelayan)?
- c) Apakah ada kesalahan atau hambatan dalam penyampaian informasi yang menyebabkan nelayan tidak memahami atau tidak mendukung kebijakan?

Jika komunikasi tidak berjalan efektif, kebijakan bisa gagal meskipun tujuannya baik.

2. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya mencakup segala sesuatu yang diperlukan untuk mendukung penerapan kebijakan, termasuk dana, tenaga kerja, teknologi, dan infrastruktur.

Ketersediaan sumber daya yang memadai sangat krusial bagi keberhasilan

kebijakan publik, karena hal ini memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif. Dalam konteks kebijakan publik, sumber daya dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu:

- a) Sumber daya finansial (dana)
- b) Sumber daya manusia (tenaga kerja)
- c) Sumber daya teknologi (peralatan dan sistem)
- d) Sumber daya infrastruktur (fasilitas dan prasarana)

Keberhasilan penggunaan sumber daya dalam kebijakan publik dapat diukur dari beberapa indikator, seperti:

- a. Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya
- b. Tingkat efektifitas penggunaan sumber daya.
- c. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penggunaan sumber daya

Implementasi kebijakan memerlukan sumber daya yang cukup, baik dalam bentuk dana, tenaga kerja, maupun sarana dan prasarana.

Jika sumber daya tidak mencukupi, implementasi kebijakan bisa terhambat.

3. Disposisi atau Sikap Pelaksana (*Disposition*)

Disposisi merujuk pada kemampuan untuk membuat keputusan dan melaksanakan tindakan yang tepat dalam rangka mengimplementasikan kebijakan publik. Selain itu, disposisi juga mencakup kemampuan untuk mengatur sumber daya serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam konteks kebijakan publik, disposisi yang efektif berperan penting dalam memastikan bahwa kebijakan dapat diimplementasikan secara efisien dan efektif. Disposisi yang baik juga berfungsi untuk menangani berbagai hambatan dan tantangan yang mungkin muncul selama proses implementasi.

Dalam kajian teori kebijakan publik, disposisi sering kali dihubungkan

dengan kapasitas birokrasi dalam melaksanakan kebijakan. Oleh karena itu,

disposisi yang efektif sangat penting agar birokrasi dapat membuat keputusan yang tepat dan melakukan tindakan yang sesuai dalam implementasi kebijakan. Disposisi mengacu pada sikap dan komitmen aparat desa dan pelaksana kebijakan. Jika pelaksana kebijakan tidak memiliki sikap yang baik, maka kebijakan hanya akan berjalan di atas kertas tanpa hasil nyata.

4. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)

Struktur birokrasi mencerminkan desain dan fungsi organisasi yang bertugas untuk melaksanakan kebijakan. Keberhasilan kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh seberapa efektifnya struktur birokrasi, karena hal ini memastikan bahwa kebijakan dapat diimplementasikan dengan cara yang efisien dan efektif. Dalam konteks kebijakan publik, struktur birokrasi dapat dikelompokkan menjadi beberapa tipe, antara lain: Struktur birokrasi sentralisasi (pusat).

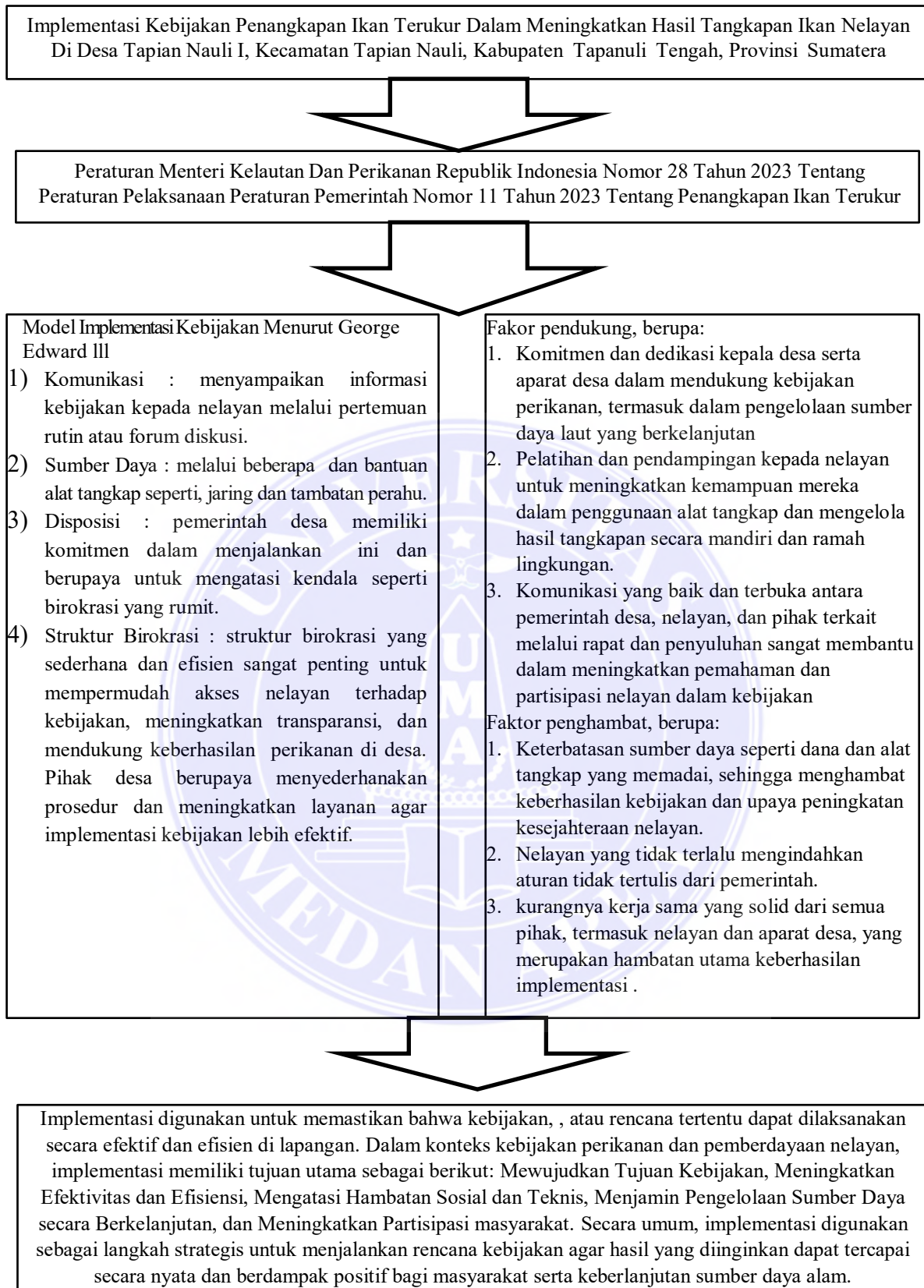
- a) Struktur birokrasi desentralisasi (daerah)
- b) Struktur birokrasi fungsional (berdasarkan fungsi)

Struktur birokrasi menentukan bagaimana kebijakan dijalankan di tingkat desa.

Penelitian ini dapat menilai:

- a. Apakah ada mekanisme yang jelas dalam distribusi bantuan alat tangkap?
- b. Apakah kebijakan yang dibuat memiliki regulasi atau aturan tertulis yang jelas?
- c. Apakah ada koordinasi antara desa, dinas perikanan, dan pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan ini?

Struktur birokrasi yang terlalu rumit atau tidak efisien bisa menyebabkan kebijakan tidak berjalan sebagaimana mestinya.



Gambar 1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang mengutamakan pengumpulan data non-numerik, seperti wawancara mendalam dengan informan, observasi baik secara partisipatif maupun non-partisipatif, studi kasus terhadap fenomena tertentu, serta analisis berbagai dokumen seperti artikel, buku, dan laporan. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena sosial dengan lebih mendalam dan terperinci, serta untuk mengidentifikasi tema dan pola yang muncul dari data yang ada (Creswell, 2012: 18-20). Menurut Sugiyono (2017: 260), penelitian kualitatif adalah pendekatan yang menggunakan data non-numerik, seperti kata-kata, gambar, dan pengamatan, untuk memahami fenomena sosial dengan cara yang mendalam dan rinci. Dalam konteks penelitian kualitatif, sumber data tidak hanya terbatas pada wawancara dan observasi, tetapi juga dapat diperoleh dari beragam sumber lainnya.

Menurut Creswell (2012: 135) sumber data kualitatif mencakup seperti dokumen, buku, artikel, laporan, serta rekaman audio dan video. Selain itu, penelitian ini juga dapat memanfaatkan sumber data dari internet, seperti blog, forum, dan media sosial. Sumber data yang diperoleh tersebut baik dari internet maupun tidak dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam mengenai fenomena sosial yang sedang diteliti. Selain itu, dalam penelitian kualitatif, sumber data juga bisa berupa foto, gambar, dan artefak lainnya. Menurut Sugiyono (2014) penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan yang dirancang untuk menjelajahi objek dalam keadaan alami. Berbeda dengan metode eksperimental d

penelitian kualitatif, peneliti berfungsi sebagai alat utama. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik triangulasi yang berarti menggabungkan beberapa metode. Sedangkan analisis data dilakukan secara induktif. Hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemaknaan daripada generalisasi.

Dalam penelitian kualitatif, objek yang diteliti berada dalam lingkungan yang alami, sehingga metode ini sering disebut sebagai metode naturalistik. Dalam pendekatan ini, objek dibiarkan apa adanya tanpa adanya manipulasi dari peneliti, sehingga kondisi objek cenderung stabil saat peneliti masuk, berada di dalamnya, dan setelah keluar. Metode penelitian ini berlandaskan pada perubahan paradigma dalam pemahaman fenomena sosial. Perubahan ini menandai pergeseran dari pendekatan positivisme, yang cenderung melihat fenomena secara tunggal, statis, dan konkret, ke dalam paradigma postpositivisme. Dalam konteks postpositivisme, realitas dipahami sebagai sesuatu yang holistik, kompleks, dinamis, dan kaya akan makna. Dengan mengikuti paradigma ini, penelitian ini mengadopsi metode kualitatif, di mana peneliti berperan sebagai instrumen atau "alat manusia". Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, tujuan peneliti adalah untuk memberikan gambaran mendalam mengenai implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) dalam upaya meningkatkan hasil tangkapan ikan nelayan di Desa Tapan Nauli I, Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang jelas dan bermakna mengenai tersebut.

3.2. Lokasi Peneliti

Penelitian ini direncanakan di Dusun I Pargodungan, Desa Tapan Nauli 1, Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, 22618.

3.3 Lokasi Peneliti

Penelitian tentang Kebijakan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Hasil Tangkapan Ikan Nelayan Di Desa Tapan Nauli I, Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara di rencanakan pada Desember 2024 sampai April 2025.

Tabel 2 : Waktu Penelitian

No.	Uraian Proposal	Des 2024	Jan 2025	Feb 2025	Mar 2025	Apr 2025	Mei 2025	Jun 2025	Jul 2025	Agst 2025	Sep 2025
1	Pengajuan Judul										
2	Penyusunan proposal										
3	Seminar Proposal										
4	Perbaikan Proposal										
5	Pengambilan Data Keputusan										
6	Penyusunan Skripsi										
7	Seminar Hasil										
8	Perbaikan Skripsi										
9	Sidang Meja Hijau										

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan individu yang menyediakan informasi mendalam kepada peneliti atau pewawancara mengenai diri mereka sendiri, orang lain, atau suatu peristiwa serta permasalahan yang sedang diteliti. Informan ini dipilih melalui metode purposive sampling, dengan harapan mereka dapat memberikan informasi yang komprehensif sesuai dengan tujuan penelitian.

Berdasarkan pendapat Hendarsono dalam Suyanto (2005: 171-172), terdapat tiga kategori informan penelitian, yaitu:

1) Informan Kunci

Informan kunci adalah individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keahlian yang berkaitan erat dengan topik penelitian. Mereka mampu memberikan informasi yang akurat dan berguna terkait fenomena atau isu yang sedang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, informan kunci adalah Pj Kepala Desa, Bapak Alitua Situmeang, ST, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan .

2) Informan Utama

Informan utama adalah individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keahlian yang sangat relevan dengan topik penelitian, sehingga dapat memberikan informasi yang paling akurat dan bermanfaat mengenai fenomena atau isu yang sedang diteliti. Dalam konteks penelitian, informan utama adalah Kepala Desa Tapian Nauli 1, yaitu Bapak Inra Waruwu, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Desa. Beliau memiliki informasi strategis terkait berbagai aspek dan sumber data yang relevan dengan penelitian.

3) Informan Tambahan

Informan tambahan (informan sekunder) adalah individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keahlian yang relevan dengan topik penelitian, meskipun mereka tidak memiliki pengalaman langsung terkait fenomena atau isu yang sedang diteliti. Salah satu contoh informan tambahan adalah Bapak Metjen Tanjung, yang menjabat sebagai Kepala Dusun I (Kadus I). Informan Masyarakat Nelayan (Informan Nelayan) adalah individu/kelompok yang memiliki pengalaman langsung dalam melakukan penangkapan ikan dan dapat memberikan informasi

tentang kondisi perikanan dan tantangan yang dihadapi. Peneliti mengangkat 3 nelayan sebagai informan tambahannya, yaitu nelayan I : Bapak Masludin Pasaribu, nelayan II : Binsar Siregar, Nelayan III : Azhar Hutagalung.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merujuk pada metode atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dalam suatu penelitian. Dalam konteks penelitian kualitatif, teknik ini berfungsi untuk mengumpulkan data yang dapat membantu peneliti dalam memahami fenomena atau peristiwa yang sedang diteliti. Teknik pengumpulan data adalah langkah yang krusial dalam suatu penelitian, mengingat tujuan utama dari penelitian adalah untuk memperoleh data yang akurat. Tanpa pemahaman yang mendalam tentang teknik pengumpulan data, peneliti akan menghadapi kesulitan dalam mengumpulkan data yang memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Sugiyono (2014: 63). Berikut adalah beberapa teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif: wawancara, pengamatan, dokumentasi, analisis isi, dan studi kasus.

Menurut Creswell (2013: 226), teknik pengumpulan data kualitatif dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu :

- a. Teknik pengumpulan data yang berbasis pada wawancara, seperti wawancara mendalam dan wawancara kelompok.
- b. Teknik pengumpulan data yang berbasis pada observasi, seperti observasi partisipatif dan observasi non-partisipatif.
- c. Teknik pengumpulan data yang berbasis pada analisis dokumen, seperti dokumentasi dan analisis isi.

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan yang melibatkan konsentrasi penuh terhadap suatu objek dengan memanfaatkan semua indra. Menurut Moleong (2005: 127) dalam konteks ini, peran peneliti sebagai pengamat tidak sepenuhnya berperan sebagai pemeran, melainkan tetap menjalankan fungsi sebagai pengamat. Dalam hal ini, peneliti berperan sebagai anggota yang terlibat, tanpa sepenuhnya menghilangkan jarak dalam pengamatan. Moleong (1988: 157) menjelaskan bahwa observasi memungkinkan peneliti merasakan dan menghayati apa yang dialami oleh subjek penelitian. Dengan demikian, proses ini mendukung pembentukan pengetahuan yang dapat dipahami bersama, baik oleh peneliti maupun subjek.

Salah satu keuntungan dari menggunakan teknik observasi adalah pengalaman mendalam yang diperoleh, di mana peneliti dapat berinteraksi langsung dengan subjek penelitian. Dengan melakukan observasi pengamat langsung terhadap fenomena sosial yang ingin dikaji. Dalam kajian tersebut menurut Spradley (1980: 54-59) terdapat dua pendekatan dalam melakukan observasi. Secara partisipatif (*participant observation*): peneliti terlibat langsung dalam kegiatan yang sedang diamati.

2. Observasi non- partisipatif (*non-participant observation*):

Peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang sedang diamati. Menurut Sugiyono (2014: 70), observasi merupakan dasar dari semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan dapat bekerja dengan hanya memanfaatkan data, yang merupakan fakta mengenai realitas dunia yang diperoleh melalui observasi. Proses pengumpulan data ini sering kali didukung oleh beragam alat canggih, sehingga objek-objek yang sangat kecil, seperti proton dan elektron, maupun yang sangat

jauh, seperti benda-benda angkasa, dapat diobservasi dengan jelas. Selain itu, Sugiyono (2014: 71) menekankan bahwa "melalui observasi, peneliti dapat memahami perilaku serta makna yang terkandung di dalamnya. " Dengan demikian, observasi memberikan pemahaman mendalam mengenai perilaku dan konteks yang melatarbelakanginya.

3. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2017: 161), wawancara adalah proses interaksi langsung antara peneliti dan responden, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Hal senada juga diungkapkan oleh Habib (2018: 121), yang menjelaskan bahwa wawancara dilakukan untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam dan detail tentang fenomena yang sedang diteliti. Selain itu, sejumlah peneliti lain mengartikan wawancara sebagai metode pengumpulan data yang bertujuan untuk mendapatkan informasi mendalam dan terperinci mengenai fenomena yang sedang diteliti.

Creswell (2010: 217) menyatakan bahwa wawancara merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan percakapan antara peneliti dan responden, sehingga dapat mengungkap informasi yang lebih dalam tentang fenomena tersebut. Senada dengan itu, Yin (2009: 103) juga mendefinisikan wawancara sebagai metode untuk menggali informasi mendalam dengan mengadakan pembicaraan langsung dengan responden. Dalam penelitian ini, wawancara akan dimanfaatkan sebagai metode pengumpulan data untuk mendapatkan wawasan yang lebih rinci mengenai fenomena yang diteliti.

Proses wawancara akan dilakukan dengan berbicara langsung kepada responden, informasi yang terkumpul akan dianalisis secara sistematis dan terstruktur. Wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk menggali informasi yang lebih mendalam dari para informan yang terlibat dalam Kebijakan Kepala Desa terkait upaya peningkatan hasil tangkapan ikan para nelayan di Desa Tapan Nauli I, Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Wawancara ini akan mencakup:

Tabel 3 Informan Penelitian

No	Informan	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Kunci	Alitua Situmeang, ST	Pj. Kepala Desa Tapan Nauli I	Memberi wawasan strategis mengenai tujuan yang dilaksanakan agar dapat tercapai.
2.	Utama	Inra Waruwu	Sekretaris Desa	Terlibat langsung dalam operasional dan pelaksanaan . Mereka dapat memberikan informasi tentang -, tantangan/hambatan serta hasil yang telah dicapai selama berlangsung.
3.	Tambahan	Metjen Tanjung	Kadus I	Berbagi pandangan, pengalaman, serta persepsi mereka terkait manfaat , kendala yang dihadapi, dan harapan mereka untuk ini. Nelayan juga dapat sebagai informan tambahan.
		Masludin Pasaribu	Nelayan I	Bekerja menangkap ikan di laut
		Binsar Siregar	Nelayan II	Bekerja menangkap ikan di laut
		Azhar Hutagalung	Nelayan III	Bekerja menangkap ikan di laut

Melalui wawancara ini, peneliti berharap untuk menggali perspektif dari setiap elemen yang terlibat, sehingga dapat memperoleh pemahaman yang menyeluruh Mengenai Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dalam meningkatkan hasil tangkapan ikan nelayan di Dusun I Pargodungan.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang memanfaatkan beragam dokumen yang tersedia untuk mendapatkan informasi tentang fenomena yang sedang diteliti. Menurut, Patton (2002: 124) dokumentasi meliputi penggunaan catatan, laporan, dan foto sebagai sumber informasi. Selain itu, Flick (2006: 246) juga mencatat bahwa dokumentasi mencakup pemanfaatan dokumen resmi, surat, dan berbagai materi lainnya yang memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti. Metode ini memiliki peranan yang sangat penting dalam menyediakan informasi yang akurat dan objektif. Silverman (2011: 123) menambahkan bahwa dokumentasi adalah alat yang efektif dalam mengeksplorasi fenomena penelitian, dengan memanfaatkan berbagai jenis dokumen seperti laporan dan foto. Dengan demikian, peneliti dapat mengumpulkan informasi yang lebih rinci dan mendalam. Dalam penelitian ini, kami akan memanfaatkan dokumentasi sebagai salah satu metode pengumpulan data. Kami akan menggunakan dokumen-dokumen yang ada, termasuk catatan, laporan, dan foto, untuk mendapatkan informasi yang akurat dan objektif tentang fenomena yang sedang kami teliti.

Dalam penelitian ini, dokumentasi lapangan digunakan sebagai salah satu metode pengumpulan data untuk melengkapi hasil observasi dan wawancara. Peran dokumentasi sangat penting, karena ia menyediakan catatan historis yang mencerminkan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi serta memberikan konteks yang lebih mendalam terhadap data yang diperoleh langsung di lapangan. Dokumen-dokumen yang dikumpulkan mencakup catatan, kebijakan pelatihan, foto-foto kegiatan, serta hasil evaluasi dari Kebijakan Kepala Desa dalam Meningkatkan Hasil Tangkapan Ikan Nelayan di Desa Tapian Nauli I, Kecamatan

Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai Kebijakan Kepala Desa. Dalam penelitian, dokumen-dokumen yang ada berperan penting dalam mengonfirmasi, melengkapi, atau memperkuat informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Sebagaimana dinyatakan oleh Bogdan dalam Sugiyono (2014: 84), dokumen pribadi dalam penelitian kualitatif dapat mencakup beragam narasi yang memberikan wawasan tentang tindakan, pengalaman, dan keyakinan individu. Hal ini dapat memberikan sudut pandang tambahan yang kaya dalam memahami fenomena yang sedang diteliti.

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, kami menggunakan teknik analisis data kualitatif, yang merupakan proses pengolahan data secara sistematis dan terstruktur. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan rinci mengenai fenomena yang sedang diteliti (Creswell, 2009). Teknik analisis yang diterapkan dalam penelitian ini mengacu pada model analisis data yang diajukan oleh Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2018). Proses analisis terdiri dari beberapa tahap, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Ketiga tahap ini bertujuan untuk meraih informasi yang lebih akurat dan objektif tentang fenomena yang dikaji. Proses analisis memerlukan daya kreatif yang tinggi serta kemampuan intelektual. Karena tidak ada metode yang baku dalam melaksanakan analisis, setiap peneliti dituntut untuk menemukan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik

penelitian mereka. Dengan demikian, bahan yang sama dapat diklasifikasikan secara berbeda oleh peneliti yang berbeda pula.

1. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian kualitatif melibatkan beberapa langkah sistematis untuk memperoleh informasi yang relevan dan akurat. Awalnya, peneliti melakukan studi pustaka untuk memverifikasi adanya masalah yang akan diteliti dan melakukan pembuktian awal. Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dan observasi untuk mengumpulkan data di lapangan. Pengumpulan data merupakan proses terstruktur yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, beberapa metode yang dapat digunakan antara lain wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Tujuan utama pengumpulan data adalah untuk memperoleh informasi yang tepat, relevan, dan komprehensif untuk menjawab pertanyaan penelitian. Peneliti dapat menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, seperti perekaman wawancara, pencatatan hasil observasi, dan pengumpulan dokumen. Setelah data terkumpul, peneliti dapat menganalisisnya untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti. Dengan demikian, pengumpulan data yang sistematis dan terstruktur sangat penting dalam penelitian kualitatif untuk memastikan bahwa data yang diperoleh akurat dan relevan dengan tujuan penelitian.

2. Reduksi Data

Proses merangkum, memilih dan memilah segala bentuk data yang diperoleh di lapangan untuk dibentuk menjadi tulisan yang akan dianalisis. Hasil dari rekaman wawancara yang dilakukan pada subjek akan dibentuk menjadi verbatim dan hasil

observasi akan dibentuk menjadi tabel observasi. Peneliti menjalani proses pengolahan data yang mencakup penggunaan berbagai teknik analisis untuk menggali informasi yang lebih mendalam dan detail tentang fenomena yang sedang diteliti. Pada tahap ini, peneliti melaksanakan pengkodean data, pengelompokan, serta identifikasi tema-tema yang muncul dari data yang telah dikumpulkan. Tujuan dari reduksi data adalah untuk mempermudah analisis dan meningkatkan kevalidan hasil penelitian. Dengan melakukan reduksi data, peneliti dapat lebih fokus pada aspek-aspek yang paling penting dan relevan dengan tujuan penelitian mereka. Fokus utama dari analisis ini adalah untuk merumuskan kesimpulan mengenai implementasi kebijakan kepala desa dalam upaya meningkatkan hasil tangkap ikan para nelayan di Desa Tapian Nauli I.

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan langkah penting dalam proses penelitian, di mana informasi yang telah dikumpulkan dan dianalisis disusun sedemikian rupa agar sistematis dan mudah dipahami. Dalam tahap ini, peneliti menyampaikan temuan mereka dalam format yang jelas dan terstruktur, sehingga dapat dengan mudah diinterpretasikan. Penyajian data dapat beragam, mulai dari tabel, grafik, dan diagram, hingga penjelasan naratif, yang semuanya tergantung pada jenis data dan tujuan dari penelitian itu sendiri. Efektivitas penyajian data sangat bergantung pada kejelasan dan keterbacaan. Hal ini penting agar pembaca dapat dengan mudah memahami hasil yang diperoleh. Selain itu, konsistensi dalam format dan gaya penyajian juga krusial, agar segala yang disampaikan tetap relevan dengan tujuan dan pertanyaan penelitian. Dengan penyajian data yang baik, peneliti tidak hanya dapat menyajikan temuan dengan cara yang menarik, tetapi juga membuatnya

mudah dipahami, sehingga pembaca dapat menangkap hasil penelitian serta implikasinya dengan baik. Dalam menyajikan data, peneliti juga perlu memperhatikan keterhubungan antara data dan analisis yang telah dilakukan. Hal ini memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipahami secara menyeluruh, memberikan gambaran yang komprehensif kepada pembaca.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisis data kualitatif. Pada fase ini, peneliti berupaya mengungkap makna dan merumuskan kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan dan dianalisis. Selama tahap ini, peneliti melakukan sintesis dan interpretasi data untuk meraih pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti. Proses penarikan kesimpulan melibatkan berpikir kritis dan reflektif. Peneliti mempertimbangkan berbagai kemungkinan interpretasi, lalu memilih kesimpulan yang paling logis berdasarkan data yang ada. Selain itu, penting bagi peneliti untuk memperhatikan konteks penelitian, teori yang relevan, serta pengalaman pribadinya dalam merumuskan kesimpulan.

Kesimpulan yang baik seharusnya didasarkan pada data yang valid dan dapat dipercaya, serta melalui proses analisis yang sistematis dan transparan. Kesimpulan tersebut harus disampaikan dengan jelas, spesifik, dan relevan dengan tujuan penelitian. Di samping itu, peneliti juga perlu mempertimbangkan implikasi dari kesimpulan yang dihasilkan dan bagaimana hasil penelitian ini dapat diterapkan dalam praktik atau penelitian lanjutan. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan tidak selalu memberikan jawaban yang tegas atas rumusan masalah yang diajukan di awal. Hal ini disebabkan oleh sifat fleksibel dari masalah dan rumusan yang ada

dalam penelitian kualitatif, yang dapat berubah seiring dengan perkembangan proses penelitian di lapangan. Oleh karena itu, penarikan kesimpulan biasanya dilakukan setelah penyajian data selesai dan seluruh data yang relevan telah dianalisis. Peneliti kemudian menjalani proses pengolahan data yang meliputi berbagai teknik analisis untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan rinci tentang fenomena yang diteliti (Creswell, 2009). Pada tahap ini, peneliti menganalisis tema-tema yang muncul dari data yang dikumpulkan dan menarik kesimpulan mengenai kebijakan kepala desa dalam meningkatkan hasil tangkap ikan nelayan di Desa Tapan Nauli I.

3.7 Validasi Data

Validasi data memiliki peranan penting dalam memastikan bahwa data yang dikumpulkan bersifat akurat, objektif, dan dapat dipercaya (Miles & Huberman, 2014). Tujuan utama dari proses ini adalah untuk memastikan bahwa data yang diperoleh mampu menjawab pertanyaan penelitian serta untuk menjamin keakuratan kesimpulan yang diambil darinya. Mengacu pada Miles & Huberman (2014), terdapat beberapa metode yang dapat diterapkan dalam validasi data untuk penelitian kualitatif. Validasi melalui triangulasi data merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dari berbagai sumber adalah konsisten dan akurat. Proses triangulasi data dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang beragam, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

Validasi melalui triangulasi data merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dari berbagai sumber adalah konsisten

dan akurat. Proses triangulasi data dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang beragam, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Sebagai contoh, peneliti dapat mengumpulkan data dari peserta pelatihan, pengelola pelatihan, instruktur, serta dokumen-dokumen terkait seperti laporan pelatihan dan catatan absensi. Triangulasi adalah teknik validasi data yang menggunakan beberapa sumber berbeda untuk mengecek keabsahan data. Tujuan dari triangulasi data adalah untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh adalah tepat dan dapat diandalkan.

Trianggulasi data merupakan teknik pengumpulan informasi yang memanfaatkan berbagai metode berbeda untuk mendapatkan pemahaman yang lebih akurat dan objektif mengenai fenomena yang diteliti. Creswell (2014: 247) menjelaskan bahwa triangulasi data adalah suatu teknik pengumpulan data yang melibatkan penggunaan berbagai metode yang berbeda untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dan objektif mengenai fenomena yang diteliti. Teknik ini bertujuan untuk memperkuat keabsahan dan keandalan data. Dalam penelitian ini, peneliti akan menerapkan trianggulasi data untuk memastikan akurasi dan objektivitas informasi yang diperoleh melalui berbagai metode, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Sugiyono (2009: 372) menambahkan bahwa triangulasi merupakan metode untuk memeriksa keabsahan data dengan memanfaatkan sumber atau informasi lain di luar data utama, sehingga dapat memastikan ketepatan dan konsistensi hasil penelitian. Dengan menerapkan trianggulasi data ini, peneliti akan memvalidasi hasil dari wawancara dan observasi dengan data statistik mengenai keberhasilan kebijakan Kepala Desa dalam meningkatkan hasil tangkapan ikan nelayan di Desa

Tapian Nauli I, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Contoh triangulasi data:

- a. Menggunakan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memverifikasi keabsahan data.
- b. Menggunakan data dari beberapa sumber yang berbeda, seperti responden, pengamat, dan dokumentasi, untuk memverifikasi keabsahan data

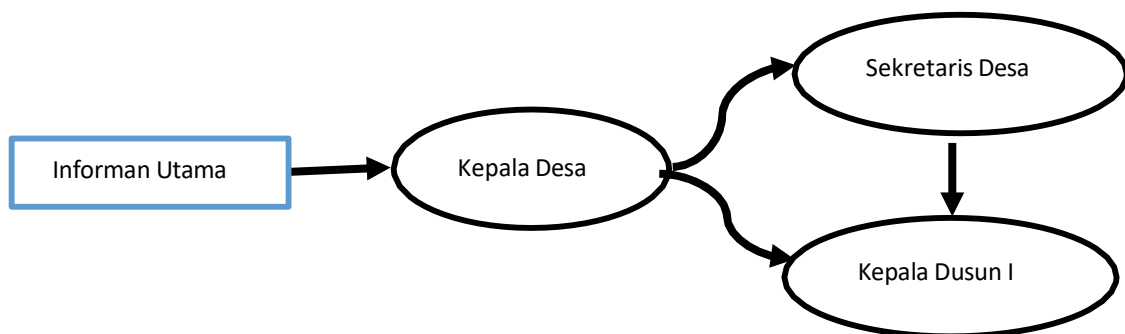
Validasi data melalui pemanfaatan beragam sumber informasi adalah langkah penting untuk menjamin akurasi dan keandalan data yang dikumpulkan. Teknik ini melibatkan penggunaan beberapa sumber yang berbeda untuk memverifikasi keabsahan informasi. Dengan cara ini, diharapkan data yang diperoleh dapat dipercaya dan memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Contoh penggunaan sumber data yang beragam:

- a. Menggunakan data dari responden yang berbeda, seperti responden yang berusia muda dan responden yang berusia tua.
- b. Menggunakan data dari beberapa lokasi yang berbeda, seperti data dari kota besar dan data dari kota kecil.

Validasi melalui penggunaan teknik analisis data yang beragam: memastikan bahwa data yang dikumpulkan dapat dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data yang beragam. Penggunaan teknik analisis data yang beragam adalah suatu teknik validasi data yang melibatkan penggunaan beberapa teknik analisis data yang berbeda untuk memverifikasi keabsahan data. Tujuan dari penggunaan teknik analisis data yang beragam adalah untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan adalah akurat dan dapat dipercaya. Contoh penggunaan teknik analisis data yang beragam:

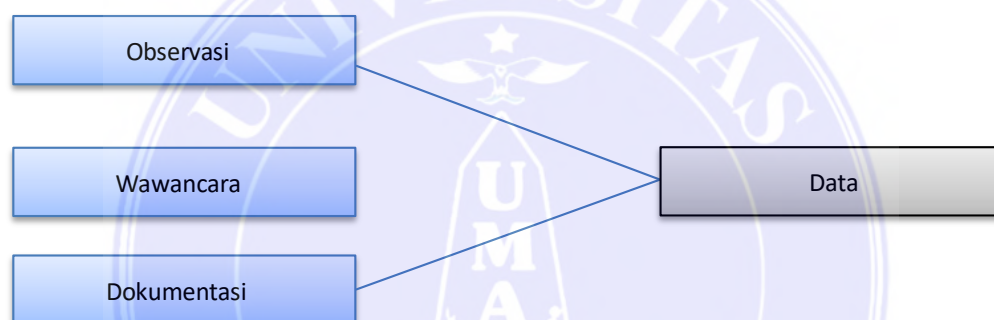
- a. Menggunakan teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif untuk memverifikasi keabsahan data.
- b. Menggunakan teknik analisis data statistik dan non-statistik untuk memverifikasi keabsahan data.

Dalam penelitian ini, yang akan saya gunakan untuk validasi data adalah menggunakan triangulasi Sumber. Validasi data melalui pemanfaatan berbagai sumber informasi merupakan langkah krusial untuk memastikan akurasi dan keandalan data yang terkumpul. Proses ini melibatkan penelusuran dan penggunaan beberapa sumber berbeda guna memverifikasi kebenaran informasi. Dengan pendekatan ini, diharapkan data yang diperoleh dapat dipercaya dan memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Dalam penelitian ini, peneliti bertujuan untuk memvalidasi data terkait implementasi kebijakan Kepala Desa dalam meningkatkan hasil tangkapan ikan nelayan di Desa Tapian Nauli I, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti menggunakan metode triangulasi. Metode ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, termasuk dokumentasi, wawancara, observasi, survei, serta analisis data. Dengan menerapkan triangulasi, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan akurat mengenai implementasi kebijakan tersebut di Desa Tapian Nauli.



Gambar 2 Triangulasi Data

Triangulasi data merupakan suatu metode yang digunakan untuk membandingkan informasi yang diperoleh dalam penelitian dengan teori atau studi sebelumnya yang relevan. Contohnya, Anda dapat membandingkan hasil wawancara yang dilakukan dengan sumber literatur atau penelitian lain yang membahas pelatihan kerja di daerah berbeda. Tujuan dari triangulasi data ini adalah untuk menilai konsistensi temuan penelitian Anda dengan hasil-hasil yang terdapat dalam literatur atau teori yang ada. Dengan cara ini, validitas temuan penelitian dapat diperkuat, sekaligus memberikan dasar teoretis yang lebih kokoh



Gambar 3 Teknik Analisis Data

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur di Desa Tapan Nauli I telah menunjukkan hasil yang cukup baik jika ditinjau dari empat faktor Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi terjalin melalui penyuluhan, sosialisasi, dan pertemuan rutin yang meningkatkan pemahaman nelayan tentang pentingnya penangkapan ikan berkelanjutan. Dukungan sumber daya berupa alokasi APBDes dan bantuan pemerintah daerah juga efektif menunjang kegiatan pelatihan, penyuluhan, pembangunan pondok nelayan, hingga distribusi alat tangkap yang bermanfaat langsung bagi nelayan. Selain itu, komitmen positif aparatur desa tercermin dalam pemanfaatan anggaran yang efisien serta kerja sama dengan lembaga eksternal untuk mendampingi nelayan dalam menjalankan kebijakan. Kejelasan struktur birokrasi memastikan bahwa setiap tahapan implementasi berjalan sistematis, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, sehingga koordinasi antar pihak dapat terjalin dengan baik. Dengan demikian, kebijakan penangkapan ikan terukur di Desa Tapan Nauli I dapat dikatakan efektif dalam meningkatkan kesadaran, keterampilan, dan kepatuhan nelayan terhadap pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan.

Faktor pendukung dari Implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur di Desa Tapan Nauli I, yaitu: Komunikasi yang efektif antara pemerintah desa, nelayan, dan stakeholder menjadi kunci untuk membangun kepercayaan, meningkatkan pemahaman kebijakan, serta mendorong kolaborasi dalam menjaga kelestarian sumber daya laut. Ketersediaan anggaran, alat tangkap, dan program

bantuan seperti BLT turut mendukung peningkatan kesejahteraan nelayan

dana yang ada masih terbatas. Komitmen kepala desa, sekretaris desa, dan kepala dusun berperan penting sebagai penghubung pemerintah dan nelayan untuk memastikan kebijakan berjalan efektif, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Struktur birokrasi yang jelas, sederhana, serta didukung digitalisasi administrasi mampu mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, pelatihan, pendampingan, dan akses informasi pasar membantu nelayan meningkatkan keterampilan, kemandirian, serta pendapatan mereka secara berkelanjutan. Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur di Desa Tapan Nauli I dapat dilihat dari beberapa aspek. Dari sisi sumber daya, keterbatasan dana, peralatan tangkap, dan infrastruktur masih menjadi kendala utama yang membuat kebijakan belum berjalan optimal. Selain itu, sikap aparat desa yang kurang serius dan ketidakmauan sebagian nelayan untuk beradaptasi turut melemahkan efektivitas program. Prosedur birokrasi yang panjang dan berbelit-belit juga membuat nelayan enggan mengikuti aturan yang ada, sehingga pelaksanaan kebijakan kurang maksimal. Di sisi lain, minimnya sosialisasi dan edukasi menyebabkan pemahaman nelayan terhadap manfaat dan mekanisme kebijakan masih rendah. Tidak sedikit pula nelayan yang lebih menaruh perhatian pada bantuan langsung seperti BLT dan subsidi, sehingga partisipasi aktif dalam kebijakan penangkapan ikan terukur masih terbatas.

5.2 Saran

Berdasarkan analisis faktor penghambat yang diidentifikasi dalam dokumen, berikut saran dan solusi yang disarankan oleh peneliti untuk mengatasi hambatan tersebut:

1. Meningkatkan Kompetensi dan Kesadaran Pelaksana serta Masyarakat :
Peneliti menyarankan agar pemerintah desa dan aparat terkait meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendidikan. Hal ini bertujuan untuk mengubah sikap negatif dan meningkatkan profesionalisme pelaksana serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebijakan perikanan yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan Sosialisasi dan Edukasi kepada Nelayan : Peneliti menyarankan agar dilakukan sosialisasi yang lebih intensif dan berkelanjutan mengenai manfaat kebijakan penangkapan ikan yang terukur, serta cara kerja, sehingga partisipasi nelayan dapat meningkat dan mereka memahami bahwa kebijakan ini bertujuan untuk konservasi sumber daya dan peningkatan hasil dalam jangka panjang.
3. Memperkuat Komitmen dan Kerja Sama Antar Pihak : Peneliti menekankan pentingnya adanya komitmen kuat dari seluruh pihak, termasuk aparat desa dan nelayan, melalui kerja sama yang harmonis. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun kesepahaman bersama dan menghilangkan sikap tidak serius dalam pelaksanaan .
4. Mengoptimalkan Penggunaan Sumber Daya dan Mencari Alternatif Pendanaan : Peneliti menyarankan agar pemerintah desa lebih efisien dalam penggunaan dana desa dan sumber daya yang ada. Selain itu, perlu menggali sumber pendanaan alternatif melalui bentuk kerja sama dengan organisasi lain, swasta, maupun pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan alat tangkap dan infrastruktur.
5. Meningkatkan Dukungan dan Partisipasi Masyarakat Melalui Inisiatif Inovatif Peneliti mengusulkan pengembangan inovasi, seperti penggunaan

teknologi informasi, digitalisasi administrasi, dan pelatihan berbasis teknologi, untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akses informasi sehingga meningkatkan partisipasi dan motivasi nelayan dalam mengikuti kebijakan.

6. Membangun Motivasi Nelayan Melalui Insentif Positif : Untuk mengatasi ketergantungan pada bantuan langsung, peneliti menyarankan agar pemerintah desa mengembangkan insentif yang lebih berkelanjutan, seperti pelatihan keterampilan dan akses pasar, yang dapat meningkatkan pendapatan nelayan dan semangat mereka berpartisipasi aktif dalam kebijakan.

Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan hambatan seperti sikap negatif, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya edukasi dapat diminimalisasi, sehingga kebijakan pengelolaan perikanan akan lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anderson, J. E. (1979). *Public Policymaking*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Creswell, J. W. (2010). *Educational Research Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research* (4th ed.). London: Pearson Merrill Prentice Hall.
- Creswell, J. W. (2012). *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research* (4th ed.). Boston: Pearson Education.
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). London: SAGE Publications.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). London: SAGE Publications.
- Dunn, W. N. (1994). *Public Policy Analysis: An Introduction*. New Jersey: Pearson Education.
- Flick, U. (2006). *An Introduction to Qualitative Research*. London: SAGE Publications.
- Habib, U. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Persada.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook* (3rd ed.). New York: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (1988). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nugroho, R. (2009). *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research & Evaluation Methods*. London: SAGE Publications.
- Sastrawidjaya. (2002). *Nelayan Nusantara*. Jakarta: Pusat Riset Pengolahan Produk dan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.
- Silverman, D. (2011). *Interpreting Qualitative Data: Methods for Analyzing Talk, Text, and Interaction*. London: SAGE Publications.
- Spradley, J. P. (1980). *Participant Observation*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, B. (2005). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Taufiqurokhman, & Satispi, E. (2018). *Teori dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik*. Tangerang Selatan: UMJ Press.
- Thoha, M. (2012). *Kebijakan Publik: Analisis Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Rajawali Persada.
- Winarno, B. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Yin, R. (2009). *Case Study Research: Design and Methods* (4th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- JURNAL:**
- Effendi, H. (2017). Pengaruh Kualitas Alat Tangkap terhadap Hasil Tangkap Ikan. *Jurnal Ilmu Kelautan*, 12(2), 123–130.
- Fauzi, A. (2019). Penangkapan Ikan Terukur: Suatu Pendekatan untuk Meningkatkan Pendapatan Nelayan. *Jurnal Ekonomi Perikanan*, 5(1), 1–30.
- Iskandar, A. (2012). Kebijakan dan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat melalui Pabrik Garam. *Jurnal Sosial Humaniora*, 3(1), 1–11.

Hartono, D. (2019). Pengembangan Sistem Informasi Penangkapan Ikan di Indonesia. *Jurnal Teknologi Informasi*, 16(1), 1–8.

Prayitno, S. (2018). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Hasil Tangkap Ikan. *Jurnal Ilmu Kelautan*, 13(1), 1–8.

Sutrisno, S. (2018). Kerjasama antara Pemerintah dan Pihak Swasta dalam Mengembangkan Infrastruktur Perikanan. *Jurnal Kebijakan Perikanan*, 10(2), 123–130.

Tauficurokhman. (2015). Implementation of Policies Enhancing the Human Development Index in Pandeglang District, Banten Province. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 1–10.

Widyastuti, W. (2019). Penggunaan Alat Tangkap yang Selektif untuk Mengurangi Dampak Negatif terhadap Lingkungan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 14(1), 1–8.

KAMUS :

KBBI. (2016). *Kebijakan*. kemdikbud.go.id. Retrieved from July 2, 2025. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebijakan>

UNDANG-UNDANG:

Pemerintah RI. (2006). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)*. Lembaran Negara Nomor 7 Tahun 2006.

Pemerintah RI. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 2014.

Pemerintah RI. (2016). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan*. Lembaran Negara Nomor 7 Tahun 2016.

Pemerintah RI. (2021). *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, Dan Penandaan Kapal Perikanan, Serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perik*. Lembaran Negara Nomor 33 Tahun 2021.

Pemerintah RI. (2023). *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 88 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur*. Lembaran Negara Nomor 28 Tahun 2023.

DOKUMEN/LAPORAN PEMERINTAH

BPS. (2020). *Statistik Perusahaan Perikanan 2020*. bps.go.id. July 2, 2025. <https://www.bps.go.id/id/publication/2021/11/29/19818990830fa979adb29e8b/statistik-perusahaan-perikanan-2020.html>

BPS. (2023). *Nilai Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Penangkapan di Provinsi Sumatera Utara (Ribu Rupiah), 2021*. Sumatera Utara: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara.

Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2020). *Laporan Kinerja*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.



LAMPIRAN 1

LAMPIRAN SURAT IZIN RISET (UMA)



UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Seliabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 874/FIS.0/01.4/III/2025

Medan, 22/03/2025

Lampiran. : -

Hal : Permohonan Izin Pengambilan Data/Riset

Kepada Yth.

Kepala Desa Tapian Nauli I
Di Tempat

Dengan hormat,

Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa kami berikut ini :

Nama : AYU ANNISA FITRI SIMANUNGKALIT
NIM : 218520003
Program Studi : Administrasi Publik

Saat ini sedang membutuhkan beberapa data pada Kantor Kepala Desa, Tapian Nauli I untuk menyelesaikan penelitian/riset yang berjudul :

" Implementasi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dalam Meningkatkan Hasil Tangkapan Ikan Nelayan di Desa Tapian Nauli L, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara"

Perlu kami jelaskan bahwa penelitian dan pengambilan data yang diperlukan ini semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian dalam penyusunan skripsi. Sehubungan dengan ini, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan data yang diminta pada bidang yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dekan,

Musthafa S, S.Sos, M.L.P

Tembusan:

1. Ka. Prodi Administrasi Publik
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip

Lampiran 2

LAMPIRAN
SURAT IZIN RISET
(TEMPAT PENELITIAN)



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

KECAMATAN : TAPIAN NAULI
DESA : TAPIAN NAULI I
KODE DESA : 12.01.07.2002

SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN PENELITIAN

NO: 180 /12.01.07.2002/SK.PP/TN.I/V/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ALITUA SITUMEANG.ST
Jabatan : Pj Kepala Desa Tapan Nauli I Kecamatan Tapan Nauli

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : AYU ANNISA FITRI SIMANUNGKALIT
NPM : 218520003
Tempat Penelitian : Dusun I Pargadungan Desa Tapan Nauli I Kecamatan Tapan Nauli
Universitas : UNIVERSITAS MEDAN AREA
Prodi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik
Judul Skripsi : "Implementasi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dalam Meningkatkan Hasil Tangkapan Ikan Nelayan di Desa Tapan Nauli I Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara"

Nama tersebut diatas benar telah melakukan penelitian pada tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan 24 Mei 2025 di Dusun I Pargadungan Desa Tapan Nauli I Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah. Dengan judul "Implementasi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dalam Meningkatkan Hasil Tangkapan ikan Nelayan di Dusun I Pargadungan Desa Tapan Nauli I kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah Propinsi Sumatera Utara"

Demikian surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Desa Tapan Nauli I
Pada tanggal : 26 Mei 2025

PJ KEPALA DESA TAPIAN NAULI I
KECAMATAN TAPIAN NAULI



ALITUA SITUMEANG.ST
PENATA TINGKAT I
NIP 19690515 200312 1 005

Lampiran 3

LAMPIRAN BEBAS PUSTAKAWAN



UNIVERSITAS MEDAN AREA
PERPUSTAKAAN

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate / Jalan Gedung PBSI, Medan 20223
Kampus II : Jalan Sei Serayu Nomor 70 A / Jalan Setia Budi Nomor 79 B, Medan 20112 Telepon : (061) 8225602, 8201994
Fax : (061) 8226331 HP : 0811 607 259 website : www.uma.ac.id Email : univ_medanarea@uma.ac.id

**SURAT KETERANGAN
BEBAS PINJAM PERPUSTAKAAN**

No. : 9127/BP/PUMA/06/VI/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Perpustakaan Universitas Medan Area menerangkan bahwa :

Nama : AYU ANNISA FITRI SIMANUNGKALIT
NPM : 218520003
Prodi/Konsentrasi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Fakultas : FAKULTAS ISIPOL

benar telah bebas pinjam bahan pustaka dari Perpustakaan Universitas Medan Area dan telah bebas biaya buku pustaka

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Perpustakaan

Medan, 02-Jun-2025
Bidang Layanan Pengguna


Muhammad Muslim Nasution, S.Pd.I, M.Hum


Gugus Ramadani, S.Sos





 Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 4

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 7. Kantor kepala Desa Tapian Nauli I
Sumber: Dokumentasi Pribadi 2025



Gambar 8. Struktur Organisasi Perangkat Desa
Sumber: Dokumentasi Pribadi 2025

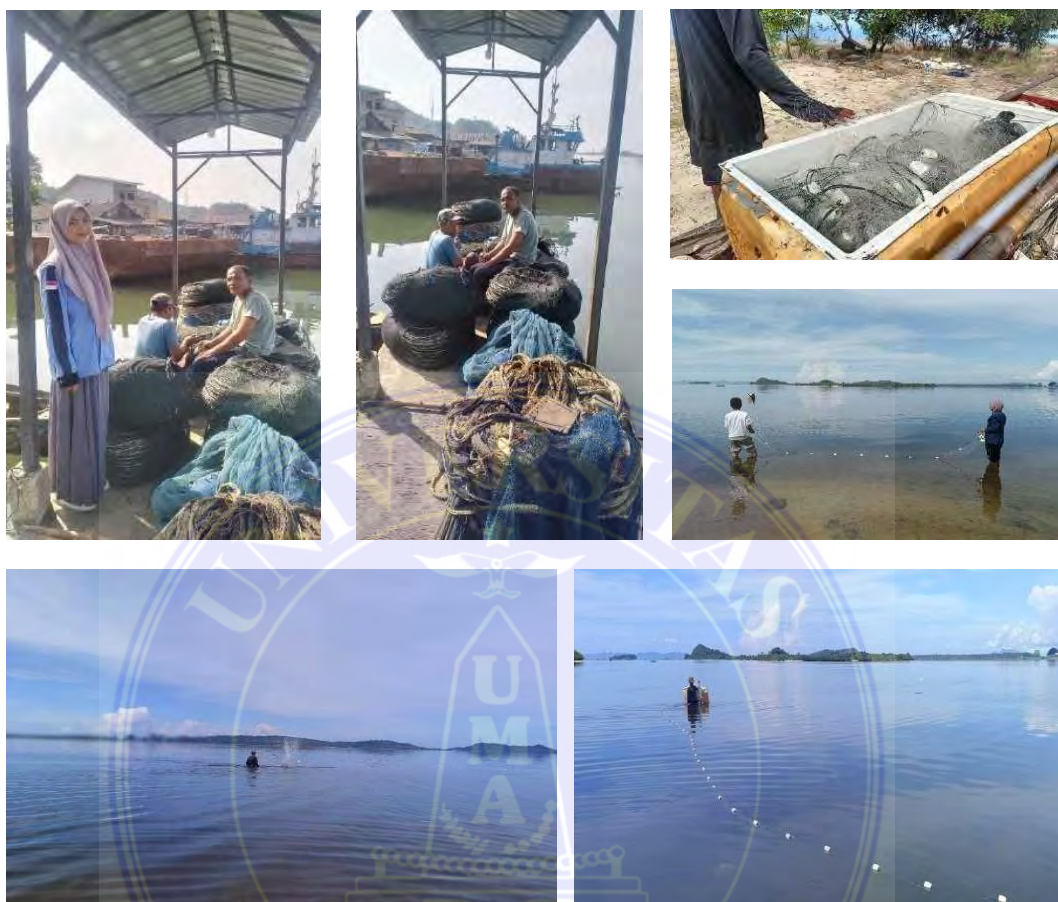
DOKUMENTASI PENAMBATAN PERAHU TRADISIONAL



Dokumentasi 9 : Dokumentasi Penambatan Perahu Tradisional
Sumber : Dokumentasi Pribadi 2025

DOKUMENTASI ALAT TANGKAP IKAN NELAYAN

1. Jaring Tangkapan Ikan

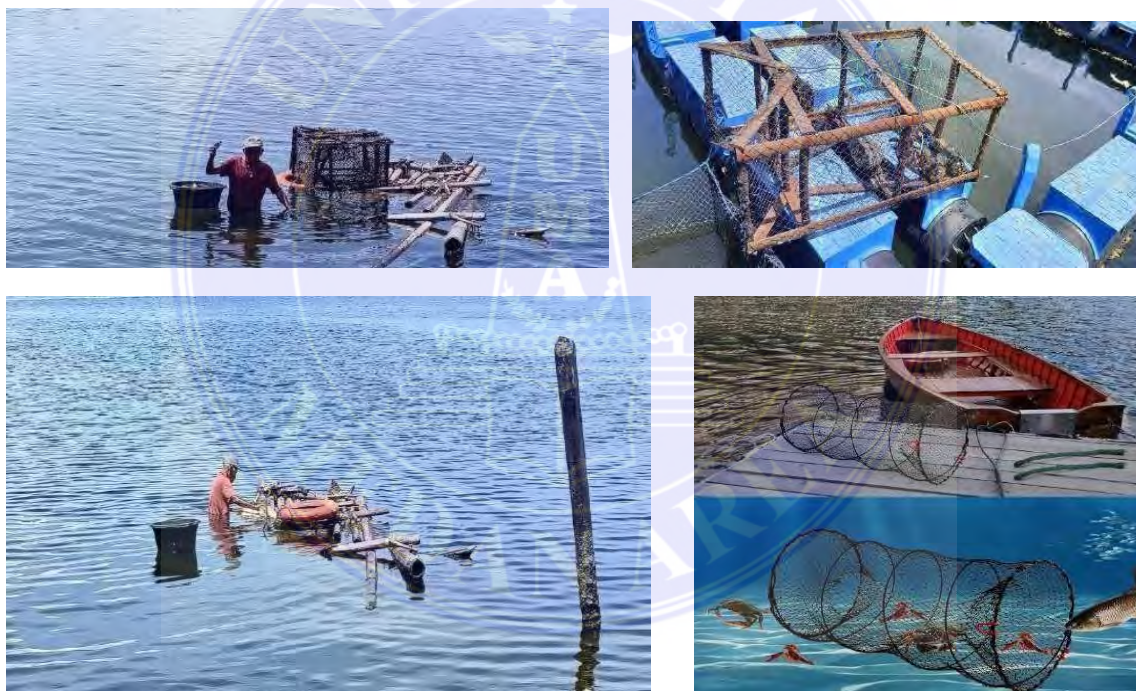


Gambar 10. Jaring Tangkap Ikan
Sumber: Dokumentasi Pribadi 2025

2. Bubu Ikan Atau Bubu Udang/Kepiting (Lukka)



Gambar 11: Bubu/Lukka
Sumber : Google dan dokumentasi pribadi 2025



3. Pancing



Gambar 11. Pancing
Sumber: Dokumentasi Pribadi 2025

4. Keramba Jaring Apung (KJA)/ Tambak



Gambar 13 : Keramba Jaring Apung/Tambak Sumber



dokumentasi pribadi 2025

DOKUMENTASI IKAN DALAM KJA (KERAMBA JARING APUNG)



Gambar 14 : Ikan Kerapu, Ikan Bawal, Jarang Gigi
Sumber Dokumentasi Pribadi 2025

DOKUMENTASI INFORMAN

1. Informan kunci : PJ. Kepala Desa

2. Informan Utama : Sekretaris Desa



Alitua Situmeang ST



Inra Waruwu

3. Informan Kunci : Kadus I dan Nelayan



Metjen Tanjung (Kadus I)



Masludin Pasaribu (Nelayan I)



Azhar Hutagalung (Nelayan II)



Binsar Siregar (Nelayan III)

Gambar 15 : Informan Kunci, Informan Utama, Informan tambahan, dan Nelayan
Sumber : Dokumentasi Pribadi 2025

DOKUMENTASI NELAYAN MODREN



Gambar 16 : Pukat Harimau dan Perahu Motor
Sumber Dokumentasi Pribadi 2025

DOKUMENTASI TAMBAHAN



Note : PLTU (Perusahaan Listrik Tenaga Uap)



Note : Rumah Pinggir Laut
Lukka



Note :



Note : Tambatan Perahu/Dermaga (sudah tidak dipakai/tidak beroperasi)

Gambar 17. Dokumentasi Tambahan
Sumber: Dokumentasi Pribadi 2025

Lampiran 5

LAMPIRAN DATA DIRI INFORMAN

1. INFORMAN KUNCI (PJ. KEPALA DESA)

Nama : Alitua Situmeang, ST
Usia : 56 Tahun
Jenis Kelamin : Laki - laki
Pendidikan terakhir : S1 Teknik
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

2. INFORMAN UTAMA (SEKRETARIS DESA)

Nama : Indra Waruwu
Usia : 48 Tahun
Jenis Kelamin : Laki - laki
Pendidikan terakhir : SMA/Sederajat
Pekerjaan : Nelayan/Pelaut

3. INFORMAN TAMBAHAN (KEPALA DUSUN I)

Nama : Metjen Tanjung
Usia : 50 Tahun
Jenis Kelamin : Laki - laki
Pendidikan terakhir : SMA/Sederajat
Pekerjaan : Wiraswasta

4. INFORMAN TAMBAHAN (NELAYAN I)

Nama : Masludin Pasaribu
Usia : 60 Tahun
Jenis Kelamin : Laki - laki
Pendidikan terakhir : SMP/Sederajat
Pekerjaan : Nelayan/Pelaut

5. INFORMAN TAMBAHAN (NELAYAN II)

Nama : Binsar Siregar
Usia : 52 Tahun
Jenis Kelamin : Laki - laki
Pendidikan terakhir : SMP/Sederajat
Pekerjaan : Nelayan/Pelaut

6. INFORMAN TAMBAHAN (NELAYAN III)

Nama : Azhar Hutagalung
Usia : 40 Tahun
Jenis Kelamin : Laki - laki
Pendidikan terakhir : SMA/Sederajat
Pekerjaan : Nelayan/Pelaut

Lampiran 6
Tabel 7: Pedoman Wawancara

No	Informan Peneliti	Aspek Berdasakan Teori George Edward III	Pertanyaan
1	Informan Kunci (Kepala Desa Tapian Nauli)	Komunikasi	1. Apa visi dan tujuan utama dari kebijakan peningkatan hasil Tangkapan Ikan Terukur (PIT) di Desa Tapian Nauli I 2. Bagaimana kebijakan ini dikomunikasikan kepada perangkat desa dan masyarakat nelayan? 3. Apakah ada sosialisasi atau penyuluhan terkait kebijakan ini? Jika ada, bagaimana pelaksanaannya? 4. Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat nelayan terhadap kebijakan ini?
		Sumber Daya	5. Apakah anggaran yang dialokasikan untuk ini sudah mencukupi? 6. Bagaimana kesiapan sumber daya manusia dalam mendukung implementasi kebijakan ini? 7. Apakah ada bantuan alat tangkap atau teknologi yang diberikan kepada nelayan? Jika ada, bagaimana distribusinya? 8. Apakah ada dukungan dari pemerintah daerah atau lembaga lain dalam ini?
		Disposisi	9. Bagaimana komitmen pemerintah desa dalam menjalankan ini? 10. Apakah ada kendala dalam koordinasi antara pemerintah desa dengan kelompok nelayan? 11. Bagaimana penerimaan masyarakat terhadap kebijakan ini? Apakah ada penolakan atau resistensi dari nelayan?
		Struktur Birokrasi	12. Bagaimana mekanisme tau prosedur dalam pelaksanaan kebijakan ini? 13. Apakah ada peraturan tertulis atau SOP (Standard Operating Procedure) dalam ini? 14. Apakah ada tantangan birokrasi yang memperlambat implementasi? Jika ada, bagaimana cara mengatasinya?
2	Informan Utama (Sekretaris Desa)	Komunikasi	1. Bagaimana perangkat desa menyampaikan informasi kebijakan kepada nelayan? 2. Apakah ada pertemuan rutin atau forum diskusi terkait kebijakan ini? 3. Apakah ada hambatan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat?
		Sumber Daya	4. Bagaimana pengelolaan anggaran dalam mendukung ini? 5. Apakah ada cukup tenaga kerja atau pendamping dalam pelaksanaan kebijakan ini? 6. Bagaimana prosedur distribusi bantuan alat tangkap bagi nelayan? 7. Apakah ada pelatihan atau edukasi bagi nelayan terkait teknologi tangkap modern?

No	Informan Peneliti	Aspek Berdasarkan Teori George Edward III	Pertanyaan
		Disposisi	8. Bagaimana tingkat keterlibatan pemerintah desa dalam mendukung ini? 9. Apakah ada kendala dalam proses implementasi kebijakan? 10. Apakah masyarakat nelayan memberikan respon positif atau ada yang merasa dirugikan?
		Struktur Birokrasi	11. Apakah ada koordinasi dengan pihak lain seperti dinas perikanan atau pemerintah daerah? 12. Bagaimana sistem pengawasan dalam memastikan kebijakan berjalan sesuai rencana? 13. Apakah ada masalah administratif yang memperlambat implementasi kebijakan?
3	Informan Tambahan (Kepala Dusun I)	Komunikasi	1. Bagaimana Kepala Dusun membantu menyebarkan informasi kebijakan kepada masyarakat nelayan? 2. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan di tingkat dusun?
		Sumber Daya	3. Apakah bantuan alat tangkap yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan nelayan? 4. Apakah ada kendala dalam pendistribusian bantuan atau fasilitas lainnya? 5. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam menjalankan kebijakan ini?
		Disposisi	6. Bagaimana reaksi nelayan terhadap kebijakan ini? 7. Apakah ada kendala sosial atau budaya yang mempengaruhi implementasi kebijakan? 8. Bagaimana dukungan dari pemerintah desa terhadap masyarakat nelayan?
		Struktur Birokrasi	9. Apakah ada kendala birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan di tingkat dusun? 10. Bagaimana peran kepala dusun dalam membantu implementasi kebijakan ini?
4	Informan Nelayan (Masyarakat Nelayan)	Komunikasi	1. Apakah Anda mengetahui adanya kebijakan dari kepala desa terkait peningkatan hasil tangkapan ikan? 2. Bagaimana cara Anda mendapatkan informasi tentang kebijakan ini? 3. Apakah informasi yang diberikan sudah cukup jelas?

No	Informan Penelitian	Aspek Berdasarkan Teori George Edward III	Pertanyaan
		Sumber Daya	4. Apakah Anda sudah menerima bantuan alat tangkap atau fasilitas lainnya? Jika ya, apakah bantuan tersebut cukup? 5. Apakah ada pelatihan atau pendampingan dari pemerintah desa terkait penggunaan alat tangkap atau teknik penangkapan ikan? 6. Apakah teknologi dan sarana yang diberikan sesuai dengan kebutuhan nelayan?
		Disposisi	7. Bagaimana pendapat Anda tentang kebijakan yang diterapkan kepala desa? 8. Apakah kebijakan ini memberikan manfaat nyata bagi Anda dan nelayan lainnya? 9. Apakah ada tantangan atau kendala yang Anda hadapi dalam mengikuti ini? 10. Apakah ada nelayan yang menolak atau merasa tidak mendapatkan manfaat dari kebijakan ini?
		Struktur Birokrasi	11. Bagaimana pengalaman Anda dalam mendapatkan bantuan dari pemerintah desa? 12. Apakah ada kendala administrasi atau proses yang berbelit dalam menerima manfaat dari kebijakan ini? 13. Apakah ada sistem pengawasan atau evaluasi terhadap efektivitas ini?